

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Perubahan paradigma pengelolaan keuangan Desa dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dikenal dengan UU Desa. Sebelumnya, Desa menjadi sub ordinat pemerintah daerah yang berimplikasi pada terbatasnya hak desa mengatur rumah tangganya (Herdiana, 2020). Tujuan utama implementasi UU Desa dalam menciptakan kemandirian desa, baik kemandirian Pemerintah Desa, maupun kemandirian masyarakat desa. Dengan demikian, lahirnya UU Desa menunjukkan optimisma untuk merealisasikan otonomi desa dalam pengembangan Desa (Herdiana, 2020).

Desa sebagai organisasi pemerintahan terkecil, terbawah, terdepan, dan terdekat dengan masyarakat, sehingga pembangunan desa menjadi prioritas penting (Laru & Suprojo, 2019). Berbagai peraturan perundangan dikeluarkan pemerintah untuk mengimplementasikan UU Desa, seperti PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa desa memiliki wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Kewenangan untuk mengatur rumah tangganya berimplikasi pada kucuran dana pada pemerintah Desa, yaitu dana desa.

Dana desa menjadikan desa sebagai wilayah yang berpotensi menjadi pusat perkembangan ekonomi (Erlina & Sirojuzilam, 2020). Kondisi ini memberikan otonomi bagi desa untuk mengelola pemerintahan dan sumber daya ekonominya (Brigham, E. F., & Ehrhardt, 2016)

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2014, setiap desa memperoleh sejumlah dana dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara spesifik (disebut Dana Desa) untuk memaksimalkan potensi sumberdaya desa. Salah satu tujuan pemberian dana desa adalah meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengamanatkan Desa untuk membentuk BUMDes. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes berperan penting baik di bidang ekonomi, pelayanan masyarakat hingga bidang usaha. Keberadaan BUMDes semakin strategis karena perannya sebagai penyokong ketahanan ekonomi desa (Widiastuti et al., 2019).

Kemendes PDTT No. 4 Tahun 2014 Bab III Bagian II Pasal 12 mengatur tentang pengelolaan keuangan BUMDes dan menyatakan

bahwa pelaksana operasional melakukan kegiatan sesuai dengan AD/ART dan berwenang membuat laporan keuangan setiap unit, membuat laporan perkembangan kegiatan per unit-unit usaha BUMDes setiap bulan, dan melaporkan perkembangan BUMDes kepada masyarakat melalui masyarakat desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun. Oleh karena itu, implementasi tata kelola keuangan merupakan upaya yang harus dilakukan BUMDes dalam merancang kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan operasional. Implementasi tata kelola keuangan diharapkan menghasilkan pelaporan keuangan BUMDes yang bermanfaat bagi stakeholder. Lebih lanjut, tata kelola bertujuan untuk menyelaraskan tujuan dari organisasi (Supriatna, N., & Kusuma, 2009)

Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dalam

pengelolaan keuangan tentu perlu diterapkan suatu tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Hal ini dikarenakan untuk penerapannya dinilai penting diberbagai lembaga. Good corporate governance merupakan sebuah konsep yang diajukan dalam meningkatkan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Demi tercapainya pengelolaan perusahaan atau lembaga yang lebih transparan bagi semua laporan keuangan diterapkannyalah konsep good corporate governance. Setiap organisasi memerlukan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan menjaga kesinambungan jangka pendek dan jangka Panjang (Hariani, P., Hasibuan, L. S., & Sinambela, 2018)

Masyarakat desa dapat menjadi penggerak dan pelaksana di dalam pembangunan daerah. Dengan semangat gotong royong masyarakat, pembangunan desa dapat dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintahan desa dengan melibatkan semua lapisan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan strategi bahwa melibatkan masyarakat desa di dalam pembangunan daerah atau nasional. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kerjasama sebagai mitra dengan pemerintahan desa sehingga rencana yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan baik (Aprillianto, B., Maharani, B., Sayekti, Y., Irmadariyani, R., Purnamawati, I. I., & Sulistiyo, 2022). Pertumbuhan

ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan 14 jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal.

Untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Febriaty, 2018). Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu: a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan b) Political will dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun (Bachrein, 8 C.E.).

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pendirian

BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.(Fkun, 2021)

Badan Usaha Milik Desa merupakan turunan undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kesan kuat yang dapat terlihat dari pertimbangan dalam pembentukan UU Desa adalah keinginan pemerintah untuk membentuk kelembagaan desa yang lebih maju, salah satunya dalam aspek ekonomi. UU Desa. dalam rangka pembangunan aspek ekonomi desa tersebut mengatur adanya badan usaha yang dimiliki desa. Meski substansi mengenai badan usaha milik desa bukanlah hal yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa, namun pada aspek kemandirian, UU Desa memberi penekanan lebih. Kemandirian yang dimaksud yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri (Herdiana, 2020) .

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga (Hariani, P., Hasibuan, L. S., & Sinambela, 2018)

Pembangunan ekonomi desa didasarkan atas kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan aset-aset desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. BUMDES sebagai tumpuan terdepan dalam pembangunan desa yang mempunyai dasar pembentukan partisipatif dan emansipatif dari masyarakat desa secara penuh. (Caya, M. F. N., & Rahayu, 2021)

Berdasarkan hal di atas seperti halnya BUMDes di Desa Ranga Kecamatan Enrekang dalam pengelolaan yang ada sudah berjalan dengan baik mengikuti prosedur. Sehingga bantuan dana dari pemerintah desa, sudah dapat menjalankan usaha alat rental molen, rental dros dan dekorasi. Dilihat dari kepengurusan yang ada BUMDes belum efektif dalam melaksanakan tahap-tahap pengelolaan keuangan yang ada.

Dalam perkembangan sekarang ini pengelolaan BUMDes Ranga cenderung tidak terkelola dengan baik, hal ini dilihat dari pengelolaan yang tidak lagi mengikuti prosedur. Dengan adanya permasalahan pengelolaan tentunya mempengaruhi kepengurusan dari pengurus BUMDes tersebut, oleh karena itu jika dalam pengelolaannya dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur tentunya BUMDes yang ada di Desa Ranga akan berdampak baik. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan

pekerjaan serta dapat bersaing dengan BUMDes yang ada di desa lain.

Telah di dirikan BUMDes di desa ranga dengan nama BUMDes ranga. Pemerintah desa dan para pengelola mendirikan BUMDes dengan usaha seperti molen, dros jagung, dan dekoasi pengantin.

- 1) Molen, juga disebut pengaduk semen atau pengaduk beton (bahasa Inggris: *concrete mixer*), adalah alat yang digunakan untuk mengaduk beton. Molen dapat berupa molen statis, molen bermesin.
- 2) Dros jagung / Mesin Perontok Jagung adalah alat mesin pertanian yang digunakan sebagai mesin pemipil jagung. Alat mesin ini bisa memisahkan biji jagung dari tongkolnya menjadi jagung pipilan. Mesin pertanian ini berfungsi sebagai mesin pemipil jagung, yang bisa menghasilkan jagung pipilan dalam jumlah banyak dalam waktu yang cepat.
- 3) Dekorasi pengantin adalah proses menghias dan mempercantik perayaan pernikahan untuk menciptakan suasana yang indah dan menarik. Dekorasi pernikahan biasanya mencakup pemilihan warna tema, bunga, hiasan meja, kursi, dekorasi altar atau panggung, pencahayaan, dan lain-lain.

Dimana ketika masyarakat memanfaatkannya akan meningkatkan penghasilan masyarakat dan pendapatan desa, dan pengembangan BUMDes di desa ranga tidak berjalan dengan optimal sehingga penulis ingin meneliti dengan judul **ANALISIS SISTEM**

PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDes DESA RANGA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan BUMDes Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang?
2. Apa tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan BUMDes Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang?
3. Bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes dalam peningkatan perekonomian masyarakat Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan sistem pengelolaan keuangan BUMDes Desa Ranga kecamatan Enrekang kabupaten Enrkan.
2. Untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam pengelolaan keuangan BUMDes Desa Ranga.
3. Untuk Mengetahui pengelolaan keuangan BUMDes dalam peningkatan perekonomian masyarakat Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini yaitu mampu memberikan kontribusi dibidang manajemen ekonomi dalam mengelola BUMDes untuk meningkatkan atau membangun perekonomian masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian selanjutnya.

3. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas lagi mengenai BUMDes.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pelaporan Keuangan BUMDes

pelaporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melibatkan prinsip-prinsip dan pedoman yang membimbing penyusunan laporan keuangan BUMDes. Beberapa konsep utama dalam pelaporan keuangan BUMDes meliputi:

- a. **Transparansi:** Laporan keuangan BUMDes harus transparan, memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan keuangan.
- b. **Keterbandingan (Comparability):** Laporan keuangan BUMDes harus dirancang agar memungkinkan perbandingan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan BUMDes lainnya. Hal ini memfasilitasi evaluasi kinerja dan perkembangan dari waktu ke waktu.
- c. **Konsistensi:** Prinsip konsistensi menekankan perlunya konsistensi dalam penggunaan metode akuntansi dan kebijakan keuangan dari satu periode ke periode berikutnya.
- d. **Materialitas:** Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus material, artinya informasi tersebut memengaruhi pengambilan keputusan para pemakai laporan.

- e. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab: Laporan keuangan BUMDes harus mencerminkan akuntabilitas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan yang baik, termasuk pelaporan yang akurat dan jujur.
- f. Asas Ekonomi Entitas: Menyatakan bahwa BUMDes dianggap sebagai entitas ekonomi yang terpisah dari pemilik atau masyarakat, sehingga keuangan BUMDes diukur secara terpisah dari keuangan individu atau entitas lain.
- g. Pelaporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting): Mengakui pentingnya melaporkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan BUMDes, selain aspek keuangan, untuk mencerminkan prinsip keberlanjutan. Penerapan pelaporan keuangan BUMDes membantu memastikan bahwa laporan keuangan memberikan informasi yang relevan, andal, dan berguna bagi berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat, pemerintah, dan investor potensial (Sawitri, A. P., Afkar, T., & Suhardiyah, 2020).

2. Proses Bisnis Dan Transaksi BUMDes

Proses bisnis dan transaksi di BUMDes melibatkan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Berikut adalah gambaran umum tentang proses bisnis dan transaksi BUMDes:

a. Perencanaan:

- (1) Identifikasi Peluang: BUMDes mengidentifikasi peluang bisnis berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis: Pengembangan rencana bisnis yang mencakup tujuan, strategi, anggaran, dan proyeksi keuangan.

b. Pendanaan:

- (1) Pengumpulan Dana: BUMDes dapat mencari pendanaan dari berbagai sumber, termasuk dana desa, pinjaman, atau investasi masyarakat.
- (2) Manajemen Keuangan: Pengelolaan dana dengan bijak, termasuk penentuan alokasi dana untuk kegiatan bisnis.

c. Pengembangan Usaha:

- (1) Implementasi Rencana Bisnis: Melaksanakan kegiatan bisnis sesuai dengan rencana yang telah disusun.
- (2) Pemasaran dan Penjualan: Promosi produk atau layanan BUMDes serta penjualan kepada masyarakat atau pasar target.

d. Operasional:

- (1) Manajemen Operasional: Pengelolaan kegiatan sehari-hari, termasuk produksi, distribusi, dan layanan kepada pelanggan.

(2) Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengelolaan tenaga kerja dan pengembangan kapasitas anggota BUMDes.

e. Pencatatan Transaksi:

(1) Pencatatan Keuangan: Mencatat transaksi harian, termasuk pemasukan, pengeluaran, dan investasi.

(2) Akuntansi: Menyusun laporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

f. Pemantauan dan Evaluasi:

(1) Monitoring Kinerja: Pemantauan terus-menerus terhadap kinerja keuangan dan operasional.

(2) Evaluasi Rencana Bisnis: Mengevaluasi sejauh mana rencana bisnis berhasil dicapai dan membuat penyesuaian jika diperlukan.

g. Pelaporan:

(1) Pelaporan Keuangan: Menyusun dan menyajikan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Pelaporan Kinerja: Memberikan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan BUMDes.

Proses ini melibatkan kerjasama dan partisipasi aktif dari masyarakat setempat serta pengelolaan yang efektif untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan BUMDes (Titioka, B. M., Huliselan, M., Sanduan, A., Ralahallo, F. N., & Siahainenia, 2020).

3. Pencatatan Keuangan BUMDes

Pencatatan keuangan Bumdes melibatkan penggunaan prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti konsistensi, keberlanjutan, dan transparansi. Proses pencatatan melibatkan perekaman setiap transaksi keuangan secara akurat dan sistematis, termasuk pemasukan, pengeluaran, dan aset. Prinsip-prinsip tersebut membantu memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang akurat tentang kesehatan keuangan Bumdes (Erlina, E., & Sirojuzilam, 2020).

Pencatatan keuangan Bumdes yang melibatkan beberapa aspek penting, antara lain:

- a. Prinsip Akuntansi Dasar: Mengacu pada prinsip-prinsip umum akuntansi, seperti konsistensi, keberlanjutan, objektivitas, dan transparansi.
- b. Pencatatan Transaksi: Melibatkan perekaman setiap transaksi keuangan Bumdes, termasuk pemasukan dari berbagai sumber (seperti penjualan produk atau jasa), pengeluaran, dan perubahan aset.
- c. Jurnal dan Buku Besar: Penggunaan jurnal untuk mencatat transaksi secara kronologis, dan buku besar untuk merinci akumulasi transaksi dan saldo akun.
- d. Laporan Keuangan: Penyusunan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas

untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi keuangan Bumdes.

- e. Rekonsiliasi Bank: Proses mencocokkan dan memastikan konsistensi antara catatan keuangan Bumdes dengan informasi yang diberikan oleh bank.
- f. Audit Internal dan Eksternal: Melibatkan pemeriksaan internal dan eksternal secara periodik untuk mengevaluasi keakuratan dan keandalan pencatatan keuangan.
- g. Kepatuhan Hukum dan Peraturan: Memastikan bahwa pencatatan keuangan Bumdes sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku.
- h. Sistem Informasi Keuangan: Penggunaan sistem informasi keuangan yang efisien untuk mendukung pencatatan, pelaporan, dan analisis keuangan Bumdes.

Teori ini membentuk dasar untuk menjaga kesehatan keuangan Bumdes, memastikan akuntabilitas, dan mendukung pengambilan keputusan yang baik.

4.Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui BUMDes

BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan Desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian Desa dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Desa

masyarakat yang dikelola secara baik dan profesional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat Desa untuk meningkatkan ekonomi Desa melalui pengelolaan keuangan Desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes) (Zulkarnaen, 2016).

Pembangunan Desa sesuai dengan pasal 78 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menanggulangi kemiskinan, sarana prasarana, pengembangan potensi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa berkelanjutan menjadi titik sentral dalam pembangunan desa, pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) menjadi tantangan pemerintah desa dalam melakukan berbagai inovasi pembangunan (Jayadinata, J. T., 2006).

Pendampingan terhadap masyarakat Desa penting dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 tentang Desa pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa pendampingan secara berjenjang harus terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan berjenjang artinya bahwa pendampingan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan harapan yang diinginkan(Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, 2019)

Pendampingan terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berjenjang dengan tetap memperhatikan aspek kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri mempunyai peran strategis dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Dari pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan sumber daya yang potensial dan profesional yang dapat dijadikan sebagai pondasi dasar dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan.

5. BUMDes

a Pengertian Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Erlina, E., & Sirojuzilam, 2020).

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga

Ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan(Caya, M. F. N., & Rahayu, 2021)

Kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Menurut Undang-Undang 43 Tahun 2014 Bab X Pasal 88 UU dan Pasal 132 tentang Peraturan Pemerintah Desa yang menyebutkan bahwa “Pendirian BUMDES dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa”

Pengertian BUMDes Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain

Pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1)menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.

Selanjutnya menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang

menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan (Hariani, P., Hasibuan, L. S., & Sinambela, 2018)

BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga

Maka dapat disimpulkan bahwa saat telah disahkannya kesepakatan tersebut ditetapkan dalam suatu peraturan Desa, maka pada saat itulah telah Lahir BUMDES sebagai badan hukum. Selanjutnya didalam pasal 132 disebutkan bahwa modal awal BUMDES bersumber dari APB Desa yang merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

b Pengertian Bidang Usaha BUMDes

Menurut Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19-24 BUMDES memiliki bidang-bidang usaha,yaitu :

1) Pada Pasal 19:

- a) BUMDES dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

b) Unit usaha dalam BUMDES sebagaimana yang dimaksudkan adalah dapat memanfaatkan Sumber Daya Lokal, yaitu :

- (1) Air Minum Desa
- (2) Usaha Listrik Desa
- (3) Lumbung Pangan
- (4) Sumber Daya Alam dan Teknologi

2) Pada Pasal 20:

a) BUMDES dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.

b) Unit usaha dalam BUMDES kegiatan usaha penyewaan meliputi :

- (1) Alat transportasi
- (2) Perkakas pesta
- (3) Gedung pertemuan
- (4) Rumah took
- (5) Tanah milik BUMDES
- (6) Barang sewaan lainnya.

3) Pada Pasal 21:

a) BUMDES dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga

b) Unit usaha dalam BUMDES dalam menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :

- (1) Jasa Pembayaran Listrik
- (2) Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat
- (3) Jasa pelayanan Lainnya.

4) Pada Pasal 22:

a) BUMDES dapat menjalankan bisnis yang memproduksi atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

b) Unit usaha dalam BUMDES dalam menjalankan kegiatan perdagangan meliputi antara lain :

- (1) Pabrik es.
- (2) Pabrik asap cair.
- (3) Hasil Pertanian.
- (4) Sumur bekas tambang.
- (5) Sumur bekas Tambang.
- (6) Kegiatan bisnis produktif lainnya

5) Pada Pasal 23:

c) BUMDES dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi.

- d) Unit usaha dalam BUMDES yang dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

6) Pada Pasal 24:

- a) BUMDES dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan Pedesaan.

- b) Unit-unit usaha sebagaimana yang dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDES fase tumbuh menjadi usaha bersama meliputi antara lain

- (1) Pengembangan kepala Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif.

- (2) Desa wisata yang menggorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat.

- (3) Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasi jenis usaha lokal lainnya.

Dinyatakan di dalam Undang-Undang bahwa BUMDES dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Maksud kebutuhan dan potensi Desa adalah :

- 1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

- 2) Tersedia sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa dan terdapat permintaan di pasar.
- 3) Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- 4) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

c Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian BUMDes sebagaimana disebut dalam Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan perekonomian Desa;
 - a) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
 - b) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
 - c) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - d) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

- e) Membuka lapangan kerja;
- f) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- g) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

d Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan (PKDSP Kemenkeu, 2007), terdapat enam prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu :

- 1) Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus
- 3) Bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 4) Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 5) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

- 6) Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 7) Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

e Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Sebagai salah satu lembaga Desa yang mewadahi kegiatan-kegiatan bidang ekonomi, maka BUMDes harus mempunyai struktur organisasi, aturan organisasi dan rencana kerja kegiatan. Susunan kepengurusan organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdiri dari:

- 1) Penasihat;
- 2) Pelaksana Operasional; dan
- 3) Pengawas.

Penasihat dijabat secara *exofficio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Sebagai penasihat BUMDes, Kades Berkewajiban:

- 1) Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- 2) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa, dan
- 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa. Sebagai Penasihat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kades berwenang:

- a) Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa;
- b) Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja Badan Usaha Milik Desa

f Jenis Usaha Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan (PKDSP Kemenkeu, 2007), jenis-jenis usaha yang ada di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), antara lain :

- 1) *Serving* adalah salah satu jenis BUMDes yang fokus menjalankan bisnis sosial yang melayani warga bisa disebut dengan pelayanan publik yang ditujukan pada seluruh masyarakat. Jenis usaha ini tidak terlalu berfokus pada pencarian keuntungan karena memang pada dasarnya motif mereka adalah sosial. Jadi mereka benar-benar melayani masyarakat tanpa terkecuali. Contohnya lumbung pangan, usaha listrik desa, penyulingan air bersih, dan lainnya
- 2) *Banking*, sesuai dengan namanya, jenis BUMDes ini berfokus pada bisnis keuangan yakni dengan memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa. Berbeda dengan Bank lainnya badan usaha desa ini memberikan bunga beban yang lebih rendah karena memang Bank Desa berorientasi pada membantu dan mensejahterakan

kehidupan masyarakat. Contohnya unit usaha dana bergulir, Bank Desa, Lembaga keuangan mikro desa, dan lainnya.

- 3) *Renting* merupakan jenis badan usaha desa yang berfokus pada bidang penyewaan yakni dengan melayani semua masyarakat desa yang membutuhkan persewaan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin sewa-menyewa lebih dikenal di kota namun ternyata usaha ini sudah sejak lama dilaksanakan di desa. Contohnya : persewaan traktor, penyewaan rumah dan toko, tanah, gedung, perkakas pesta dan lain sebagainya.
- 4) *Brokering* adalah perantara, jadi jenis BUMDes ini bisa disebut dengan lembaga perantara yang menghubungkan antara satu pihak dan pihak lainnya yang memiliki tujuan sama. Dalam desa yang sering dilaksanakan adalah menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar dengan tujuan agar petani tidak sulit mencari konsumen dan menjual hasil sawah nya. Jenis usaha ini juga bisa disebut dengan jenis usaha yang menjual pelayanan kepada para warga dan usaha-usaha kecil masyarakat. Contohnya jasa pembayaran listrik, PAM, Telpon, jasa perpanjangan pajak kendaraan bermotor dan masih banyak lainnya. Selain itu desa juga mendirikan sebuah pasar desa untuk menampung produk-

produk masyarakat untuk dijual ke pasar, seperti KUD dan lainnya

- 5) *Trading* merupakan salah satu jenis usaha di BUMDes yang memfokuskan usahanya dalam produksi dan berdagang barang-barang tertentu dalam sebuah pasar dengan skala yang luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya : Pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, hasil peternakan dan lain sebagainya.
- 6) *Holding* merupakan salah satu jenis badan usaha yang sering disebut dengan usaha bersama. Apa itu usaha bersama, jika kalian sering ke desa pasti tahu yang dimaksud dengan usaha bersama adalah sebuah unit dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri, yang diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh dan berkembang bersama. Contohnya : desa wisata yang mengordinir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat seperti kerajinan, makanan, sajian wisata, kesenian, penginapan dan lainnya. Ada juga kapal desa yang berskala besar untuk mengkoordinir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil
- 7) *Contracting* kita pasti tahu tentang kerja kontrak, jenis BUMDes yang satu ini adalah usaha kemitraan yang dilaksanakan oleh Unit usaha dalam BUMDes

bekerjasamadengan Pemerintah Desa atau pihak yang lainnya. Contohnya : Pembangunan Sarpras seperti aspal jalan, dan lain sebagainya.

6.Penggunaan keuangan

Manajemen keuangan dapat membantu sebuah bisnis yang Anda jalankan berjalan secara maksimal, sehingga bisa memperoleh keuntungan yang maksimal pula. Dalam ruang lingkup bisnis, manajemen keuangan memiliki fungsi sebagai berikut:

a Mengelola keuangan perusahaan

Manajemen keuangan berfungsi sebagai pengelola keuangan melalui perencanaan pemasukan dan pengeluaran dana dalam periode tertentu, hingga menghitung laba dan rugi yang diperoleh selama periode tersebut.

Dalam manajemen keuangan, anggaran dana yang masuk maupun keluar dicatat secara terperinci agar penggunaan dana dapat berjalan lebih maksimal. Sebab, perencanaan yang tepat akan membantu perusahaan memperkirakan keuntungan maupun kerugian yang akan dihadapi.

b Mengendalikan keuangan perusahaan

Setelah melakukan perencanaan keuangan, perlu dilakukan evaluasi untuk mengendalikan keuangan perusahaan. Apabila terdapat hal yang tidak sejalan dengan dengan rencana awal,

maka Anda bisa dapat menggunakan data keuangan tersebut sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.

Dengan kata lain, manajemen keuangan membantu bisnis Anda kembali sesuai rencana yang telah disusun di awal. Perusahaan nantinya dapat mengetahui hal-hal apa saja yang terjadi pada saat penggunaan anggaran.

c Memeriksa keuangan perusahaan

Dalam suatu bisnis, biasanya dilakukan audit atau pemeriksaan keuangan untuk memastikan bahwa keuangan di sebuah perusahaan sudah dikelola dengan baik dan berjalan tanpa ada penyalahgunaan dana.

Manajemen keuangan yang dijalankan dengan baik tentunya dapat membantu Anda untuk memeriksa kondisi keuangan bisnis yang dijalankan, sehingga meminimalisir adanya penyimpangan dalam keuangan.

d Melaporkan keuangan perusahaan

Fungsi manajemen keuangan yang satu ini dapat mempermudah Anda sebagai pemilik bisnis dalam mengambil keputusan kedepannya. Anda bisa melakukan analisis terhadap bisnis yang sedang dijalankan.

Dalam hal ini, manajemen keuangan berfungsi wadah yang menyediakan informasi tentang keuangan suatu perusahaan

secara bertahap dan rutin, mulai dari laporan keuangan kuartal, semester, hingga tahunan.

7. Penentuan Sumber Dana

Sumber dana perusahaan sangat penting di rencanakan dalam pengembangan suatu bisnis. Sumber dana dapat memberikan kelancaran operasional perusahaan.

Sumber dana perusahaan sangat penting agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan perekonomian dengan lancar. Sumber dana sangat tergantung kepada manajer keuangan sehingga diperlukan pemikiran secara keras dan serius. Hal itu dikarenakan aktifitas perusahaan secara mutlak ditopang oleh dana yang mencukupi. Sumber dana yang mencukupi juga sangat berpengaruh terhadap dilakukannya ekspansi atau pengembangan usaha.

Setiap kegiatan yang dilakukan di perusahaan tentunya membutuhkan dana. Dari kegiatan dengan skala kecil hingga skala besar semuanya membutuhkan dana operasional. Sumber dana dapat menjadi tonggak utama suatu perusahaan dapat berjalan secara berkesinambungan. Sumber dana dapat menentukan apakah perusahaan dapat bertahan atau tidak untuk melaksanakan operasionalnya. Sumber dana harus dapat mencukupi keseluruhan kebutuhan dana di dalam suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan maksimal.

Pendaan dari suatu perusahaan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen keuangan. Dalam manajemen keuangan, akan diperhtungkan secara mendetail mengenai sumber dana perusahaan yang dapat mencukupi kebutuhan operasional perusahaan. Peran manajer keuangan juga sangat penting dalam hal ini.

Pembagian dana perusahaan untuk keseluruhan operasional yang terjadi harus dapat dilakukan dengan tepat dan akurat. Dana yang dikumpulkan harus sebanding dengan kebutuhan perusahaan. Hal itu akan menjadikan perusahaan dapat terus beroperasi untuk memberikan manfaat kepada setiap pihak yang terkait.

Perusahaan perlu mempertimbangkan sumber dana yang biasanya dapat dikelompokkan mejadi tiga yaitu sumber dana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ketiga kelompok sumber dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meperoleh dana yang cukup untuk membiayai operasional.

a. Sumber Dana Jangka pendek

Sumber dana perusahaan jangka pendek biasanya akan digunakan oleh perusahaan untuk modal kerja. Dana yang tergolong dalam kelompok jangka pendek harus dikembalikan dalam jangka waktu satu tahun atau satu periode akuntansi. Pengembalian sumber dana jangka pendek tidak boleh lebih dari satu periode akuntansi. Sumber dana jangka pendek dapat

diperoleh dari pinjaman bank jangka pendek, pendanaan persediaan, dan kredit perdagangan.

b. Sumber Dana Jangka menengah

Sumber dana selanjutnya adalah jangka menengah. Sumber dana jangka menengah biasanya diperoleh dari leasing, term loan, dan equipment loan. Rentang waktu pengembalian sumber dana jangka menengah biasanya berkisar dari satu tahun periode akuntansi hingga lima tahun buku dan tidak boleh melebihi jangka waktu lima tahun.

Penggunaan sumber dana jangka menengah biasanya dilakukan perusahaan untuk keperluan yang tidak dapat dipenuhi dengan pendanaan jangka pendek. Ketika dana terlalu sulit dikembalikan dalam jangka pendek, maka akan tergolong dalam jangka menengah. Pendanaan jangka menengah juga dapat dipilih ketika terlalu sulit menerapkan skema pendanaan jangka panjang.

c. Sumber Dana Jangka panjang

Jika perusahaan melakukan ekspansi secara masif dalam skala perusahaan maka dapat menggunakan pendanaan jangka panjang. Tempo pengembalian sumber dana jangka panjang umumnya dilakukan lebih dari lima tahun buku. Jenis pendanaan jangka panjang diantaranya adalah penerbitan obligasi dan hipotik.

1) Sumber Dana Perusahaan dari Berbagai Pihak

- 2) Laba ditahan sebagai sumber pendanaan dari internal perusahaan
- 3) Supplier untuk pembiayaan jangka pendek
- 4) Bank untuk pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang
- 5) Pasar modal untuk pembiayaan jangka panjang

Sumber dana perusahaan perlu diperhitungkan dan diputuskan sebagai bentuk keberlangsungan dari suatu usaha. Tanpa adanya pendanaan, perusahaan tidak dapat beroperasi dengan lancar. Sumber dana yang diperoleh perlu dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin agar likuiditas dapat terus terjaga dan perusahaan dapat berjalan secara berkesinambungan.

8.Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Peningkatan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik.¹ Sedangkan perekonomian yang mempunyai kata dasar ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos adalah rumah tangga dan nomos berarti mengatur. Dari dasar kata ekonomi tersebut lalu mendapat imbuhan per- dan -an sehingga menjadi kata perekonomian yang memiliki pengertian tindakan, aturan atau cara tentang mengelola ekonomi rumah tangga dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup.² Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian masyarakat

adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam pengelolaan keuangan BUMDes terdapat tahapan rangkaian kegiatan yang berlangsung mengikuti siklus sebagai berikut (Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, 2019) :

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan BUMDes merupakan implementasi penerapan atau eksekusi dari anggaran pendapatan badan usaha yang dijalankan.

3. Penata usahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi yang sebenarnya berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan.

5. Pertanggungjawaban

Ketua pengelola BUMDes menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan BUMDes akhir tahun anggaran ditetapkan dengan peraturan desa.

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip-prinsip yang mengarahkan dan pengendalian perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Prinsip-Prinsip tersebut dijadikan sebagai perangkat standar yang bertujuan untuk memperbaiki citra, efisiensi dan tanggungjawab sosial perusahaan. Maka dari itu penerapan good corporate governance (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perusahaan untuk berkembang dengan baik dan

sehat. Adapun prinsip-prinsip dasar dari asas *good corporate governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangundangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesenangan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme keanggotaan dasar dan self help yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Sejalan dengan hal tersebut, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi data yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokal desa, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat setempat, seperti yang dijelaskan oleh (Rofidah, 2019) bahwa pengelolaan BUMDES perlu dilakukan secara akuntabel dengan melakukan pencatatan, otorisasi, dan menyampaikan hasil kepada masyarakat. Selain itu pelatihan pembuatan laporan keuangan untuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes juga diperlukan (Wiratna Sujarweni, V., & Laut Mertha Jaya, 2019).

Tata kelola tersebut meliputi :

a. Perencanaan

Dalam tahap perencanaan yang harus dikerjakan adalah pembentukan organisasi, menentukan jenis usaha, membuat kerangka usaha. Ketiga hal tersebut harus direncanakan dengan matang dan detail agar badan usaha dapat terwujud dan berkembang dengan baik.

b. Pengamatan

Setelah melakukan tahap perencanaan selanjutnya melakukan pengamatan, pemerintah desa perlu mengamati potensi dan aset desa yang dapat dijadikan usaha BUMDES. Dalam tahapan pengamatan ini sangat penting untuk benar-benar memahami potensi perkembangan usaha yang akan dijalankan melalui BUMDES tersebut.

c. Penataan dan Seleksi

Setelah menyelesaikan tahap pengamatan dan mendapatkan data potensi apa saja yang dapat dijadikan usaha BUMDES selanjutnya perlu melakukan penataan. Hal ini penting karena dalam tahap pengamatan biasanya akan banyak jenis usaha yang muncul, maka kemudian harus dilakukan seleksi dan penataan yang tepat, sehingga dapat diperoleh usaha mana yang paling memiliki potensi dan dapat dijadikan sebagai usaha andalan.

d. Pemeliharaan

Usaha BUMDES yang telah berjalan harus memiliki pemeliharaan yang baik, hal ini wajib hukumnya karena dana desa yang menjadi modal penggerak harus benar-benar tersalurkan sesuai peruntukannya dan memberikan keuntungan. Pemeliharaan ini meliputi menyisihkan keuntungan untuk keperluan penyusutan peralatan, keperluan teknologi baru dan pemeliharaan umum dari terjaminnya keamanan usaha.

e. Pelaporan

Tahapan kelima adalah pelaporan hasil usaha. Setiap jenis usaha wajib melakukan perhitungan usaha. Baik itu pengeluaran, sampai pemasukan. Dan ini butuh transparansi supaya bisa dilakukan evaluasi. Dalam melakukan usaha apa pun jenis usahanya harus memiliki pelaporan usaha, hal ini berguna sebagai indikator keberhasilan suatu usaha. Dalam membuat pelaporan harus teliti dan adanya transparansi untuk evaluasi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat desa.

9. Fakto-Faktor Yang Menyebabkan Pengelolaan BUMDes Tidak Berjalan Dengan Efisien

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan pengelolaan Bumdes tidak berjalan dengan efisien meliputi(Mulyadi., 2019):

- a) Keterbatasan Sumber Daya: Terbatasnya sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi dapat menghambat

kemampuan Bumdes untuk melakukan pengelolaan yang efisien.

- b) Kurangnya Keterampilan Manajerial: Ketidakmampuan dalam manajemen, perencanaan, dan pengambilan keputusan dapat menjadi hambatan bagi efisiensi operasional Bumdes.
- c) Ketidaktransparan Keuangan: Pencatatan keuangan yang tidak akurat atau transparan dapat menghambat kemampuan untuk memantau dan mengelola keuangan Bumdes dengan efisien.
- d) Kurangnya Akses Keuangan: Kesulitan mendapatkan akses ke pembiayaan atau modal dapat membatasi kemampuan Bumdes untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan efisiensi.
- e) Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat menghambat dukungan dan keterlibatan dalam pengelolaan Bumdes.
- f) Tingkat Pendidikan yang Rendah: Kurangnya pendidikan dan pemahaman mengenai konsep manajemen dan keuangan dapat menghambat kemampuan Bumdes dalam melakukan pengelolaan yang efisien.
- g) Kondisi Ekonomi Lokal: Faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi lokal atau nasional dapat memengaruhi kinerja keuangan dan operasional Bumdes.

h) Perubahan Kebijakan Pemerintah: Perubahan kebijakan pemerintah yang tidak terduga atau kurang mendukung dapat mempengaruhi efisiensi pengelolaan Bumdes.

i) Ketidakjelasan Tujuan dan Strategi: Jika tujuan dan strategi Bumdes tidak jelas atau tidak terdefinisi dengan baik, dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam mencapai efisiensi.

Pemahaman dan penanganan terhadap faktor-faktor ini dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan Bumdes dan mendukung keberlanjutan inisiatif desa tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Arif Risnandar Surbakti (2021), dengan judul penelitian, Analisis Pengelolaan keuangan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa raya kecamatan berastagi kabupaten karo. Metode yang di gunakan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian yang di peroleh adalah Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa

dengan adanya BUMDes mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimiliki BUMDes. Beberapa unit usaha yang di dirikan BUMDes memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru, serta membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya. Dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes merupakan indikator keberhasilan suatu program baik yang dirancang oleh desa

ataupun pusat. Masyarakat adalah subjek dan objek dari kegiatan, karena itu upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes sangat dibutuhkan program sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sebenarnya masyarakat itu sendiri. Kemudian untuk upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes dalam pengelolaan pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDes RAYA sudah cukup baik secara perencanaan.

Catatan: Dalam penelitian ini dia berfokus pada peningkatan perekonomian masyarakat dengan cara mengembangkan usahayang di miiki BUMDes.

Harjanti Widiastuti*, Andan Yuniarto, Evi Rahmawati (2022), Evaluasi Tata Kelola Keuangan danSistem Akuntansi di BUMDes Mekaring Pono Potorono.Metode yang di guakan pada penelitian ini dengan pendekatan kualitatif.Hasi penelitian yang di peroleh adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Potorono belum memiliki kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan sehingga unit-unit usaha belum menyusun laporan keuangan. Unit-unit usaha BUMDes telah melakukan pencatatan keuangan sederhana melalui buku kas umum, tetapi perlu didukung dengan pencatatan di buku pembantu serta standarisasi dokumen transaski untuk meningkatkan keterandalan data. Analisis proses bisnis dan transaksi membantu BUMDes menentukan dan mengklasifikasi akun-akun laporan

keuangan. Standarisasi pencatatan dan keterandalan data menjadi penting untuk pengembangan sistem akuntansi.

Catatan: Dalam penelitian ini penulis berfokus pada peningkatan pencatatan keuangan sederhana melalui buku khas umum, dan meningkatkan keterandalan data.

Aristha Purwanthari Sawitri, Taudlikhul Afkar, Martha Suhardiyah, Suharyanto. (2020) Penguatan Pengelolaan Keuangan BUMDes Sebagai Upaya Menuju Desa Mandiri di Desa Kebontunggul Mojokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pengabdian pada masyarakat telah dilaksanakan dengan adanya kegiatan ini pengurus BUMDes bertambah pengetahuan dan keterampilan di bidang keilmuan dalam kemampuan mengelola pembukuan dari usaha yang dilakukan, sehingga mempermudah dalam pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola kepada anggota dan masyarakat desa. Kegiatan ini juga dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab atas tugas yang dibebankan kepada pengelola BUMDes.

Catatan: Dalam penelitian ini berfokus pada keterampilan di bidang keilmuan dalam kemampuan mengelola pembukuan dari usaha yang dilakukan.

Christy Audina Tenda, Joanne V. Mangindaan, Aneke Y. Punuindoong, (2022) Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes

Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Desa Tounelet Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang di peroleh adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan yang dilakukan BUMDes Tounelet dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban masih bersifat sederhana dan masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Pengelolaan Keuangan BUMDes berdasarkan Prinsip GoodCorporate Governance dari Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan sudah berjalan namun belum efektif dan masih banyak yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Bumdes di Desa Tounelet belum sepenuhnya berdasarkan prinsip good corporate governance.

Catatan: Dalam penelitian ini berfokus pada penatausahaan dan pertanggung jawaban yang masih sederhana dan masih banyak kekurangan yang perluh dibenahi.

Parmin Ishak dan Fitria Syam, (2020) Pengaruh Kompetensi Dan Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDES. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian yang di peroleh adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan penggunaan teknologi informasi akuntansisecara simultan

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan tingkat signifikan sebesar 45,9% sedangkan sisanya 54,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model seperti pengalaman kerja, pelatihan dan tingkat pendidikan, kompetensi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan tingkat signifikan sebesar 56,9%, penggunaan teknologi informasi akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan sebesar 26%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi dan penggunaan teknologi informasi akuntansi, maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang di hasilkan.

Catatan: Dalam penelitian penelitian ini berfokus pada kompetensi dan penggunaan teknologi informasi akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Baretha M Titioka, Meny Huliselan, Abdullah Sanduan, Fransiska N Ralahallo, Astrid J.D. Siahainenia, SE, M.Si (2020) Pengelolaan Keuangan Bumdes di kabupaten Kepulauan Aru. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode pembelajaran partisipatif dalam bentuk ceramah, diskusi, Tanya jawab dan praktik terkait dengan pengelolaan keuangan BUMDes. Hasil penelitian yang di peroleh adalah Hasil yang dicapai dari program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

Catatan: Dalam penelitian ini berfokus pada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparaturnya pemerintah desa.

Denty Arista, Vidia Ayu Satyanovi, Labbaika Dwi Ayu Rahmawati, Andi Asri Hapsari (2021) Pendampingan Penyusunan laporan Keuangan Pada BUMDes Banyuanyer Berkarya Desa Banyuanyer Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif. pendidikan masyarakat berupa pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi sesuai dengan kaidah akuntansi kepada pengurus serta anggota BUMDes Banyuanyer Berkarya. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Hasil dari kegiatan ini adalah pengetahuan serta kemampuan pengurus beserta anggota BUMDes dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi melalui penggunaan aplikasi Microsoft Excel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BUMDes Banyuanyer Berkarya mampu meningkatkan kompetensi akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi.

Harjanti Widiastuti, Andan Yunianto, Evi Rahmawati (2022), Evaluasi Tata Kelola Keuangan dan Sistem Akuntansi di BUMDes Mekaring Pono Potorono. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Potorono

belum memiliki kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan sehingga unit-unit usaha belum menyusun laporan keuangan.

Catatan: Dalam penelitian ini berfokus pada kebijakan akuntansi dalam pelaporan keuangan sehingga unit-unit usaha belum menyusun laporan.

Lilik Handajani, Akram, Saipul Arni Muhsyaf, Ayudia Sokarina (2021) Pendampingan Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian adalah Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat kemitraan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pendampingan tentang tata kelola keuangan BUMDes. Dengan khalayak sasaran adalah kepala desa dan aparatur desa, pengelola BUMDes dan kelompok masyarakat yang relevan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap pengelolaan BUMDes yang lebih baik sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Peteluan Indah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

Catatan: Dalam penelitian ini berfokus pada pendampingan tentang tata kelola keuangan BUMDes.

Bayu Aprillianto, Bunga Maharani, Yosefa Sayekti, Ririn Irmadaryani, Indah Purnamawati, Agung Budi Sulistiyo (2022) Menuju Tata Kelola Bumdes Yang Baik Melalui Digitalisasi Dan Konsolidasi Laporan Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan

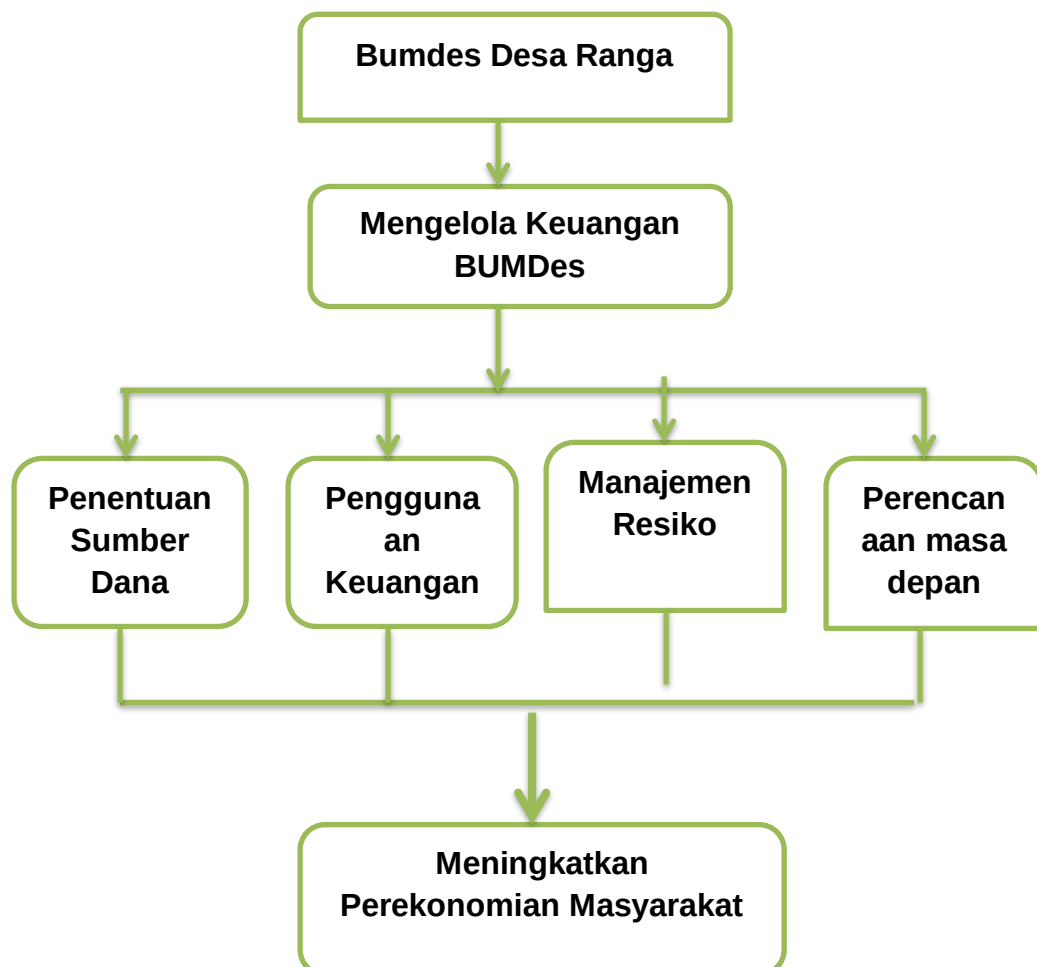
pendekatan kualitatif. hasil penelitian Kondisi pelaporan keuangan BUMDes di wilayah lereng Pegunungan Tengger dan masyarakat Pandhalungan masih manual, ada yang berbasis excel, bahkan ada yang belum memiliki laporan keuangan. Format laporan masih berupa laporan penerimaan dan pengeluaran kas, tidak berbasis akrual. Tujuan dari pengabdian ini adalah melakukan digitalisasi dan konsolidasi pelaporan keuangan berbasis Microsoft Access. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa tiap BUMDes memiliki lebih dari 1 unit usaha, sehingga digitalisas laporan keuangan dilengkapi dengan konsolidasi antar unit usaha.

Catatan: Dalam penelitian ini berfokus pada meningkatkan teknologi peningkatan laporan keuangan.

C. Kerangka Pikir

Kerangka fikir terhadap analisis manajem keuangan yang akan di terapkan dalam pengelolaan BUMDes pada penelitian ini dapat dirakaikan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan terdapat pada penelitian ini yaitu metode Penelitian Kualitatif. Terdapat beberapa pendekatan metode yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif antara lain:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Interview kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan.

B. Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Dan penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 bulan, dimulai pada bulan Desember 2023.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan rang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti (Moleong 2015;1630).

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling, yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang telah dilakukan.

Adapun Informan Utama yang dijadikan nara sumber dalam penelitian ini antara lain :

Informan utama

1. Kepala Desa Ranga
2. Sekertaris BUMDes Ranga
3. Direktur BUMDes Ranga
4. Bendahara BUMDes Ranga

Informan pendukung

- 1) Aparat Pemerintah Desa
- 2) Badan Permusyawaratan Desa
- 3) Kepala Dusun
- 4) Ketua-Ketua RT
- 5) Pengurus BUMDes
- 6) Toko Masyarakat dan Tokoh Pemuda Desa

D. Definisi operasional

Menurut Sugiono (2019:221), definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut

kemudian ditarik kesimpulannya. Di bawah ini definisi operasional dari penelitian yang akan di lakukan.

1) Tata kelola keuangan

Tata kelola keuangan Bumdes melibatkan praktik-praktik yang baik dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan organisasi.

2) BUMDes

Bumdes, atau Badan Usaha Milik Desa, adalah suatu lembaga di tingkat desa yang memiliki status hukum badan hukum dan menjalankan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kebijakan pelaporan keuangan BUMDes

Kebijakan dan pelaporan Bumdes mencakup sejumlah aspek untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan usaha.

Pencatatan keuangan melibatkan proses dokumentasi dan perekaman setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas.

3) Proses bisnis BUMDes

Proses bisnis Bumdes melibatkan serangkaian langkah untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

E. Jenis dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian kualitatif adalah data langsung dari sumbernya dalam bentuk kata-kata dan tindakan, dimana sifat dari data tersebut merupakan data yang belum diolah (Sugiyono, 2017). Berdasar pada penjelasan tersebut maka jenis data primer pada penelitian ini diperoleh dari :

a. Kehadiran Peneliti

Agar dapat memperoleh informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, maka peneliti melakukan kunjungan langsung kepada informan untuk menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Narasumber (Informan)

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah unsur-unsur yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga dalam penelitian telah ditetapkan informan yakni mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes atau sering dikatakan dengan Informan Utama

c. Fenomena/Peristiwa/Aktivitas

BUMDes Cahaya Baru dapat digolongkan kedalam Type Rintisan (*Start Up*) atau BUMDes yang dianggap baru

memulai dalam melakukan atau mengembangkan usaha. Walaupun BUMDes ini pertama kalinya dibentuk pada Tahun 2016, namun secara teknis BUMDes ini tidak berjalan dengan optimal karena tidak aktifnya Pengurus yang ditunjuk

d. Tempat atau Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada BUMDes Ranga Desa Ranga Kecamatan Enrekang

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi (Sugiyono, 2017). Sumber data informasi tambahan pada penelitian ini diperoleh dari :

a. Narasumber (Informan)

Informasi tambahan yang dikaitkan dengan narasumber utama dalam proses penelitian ini adalah unsur-unsur yang dapat memberikan informasi tentang potensi dan pola pengembangan usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan ekonomi desa.

Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil dari kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi,yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi di lakukan terhadap data terkait pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan.
2. Wawancara,teknik pengupulan data di mana peneliti secara langsung mengadakan Tanya jawab dengan narasumber. Wawancara dilakukan untuk mengetahui secara lebih rinci proses bisnis dan transaksi setiap unit usaha.
3. Dokumentasi, yaitu dari asal kata dokumen,penelti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah,dokumen, peraturan-peraturan,notulen rapat,catatan harian dan sebagainya. Dokumen dilakukan dengan penelusuran terhadap dokumen pendukung terkait sistem pelaporan keuangan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data.Diantaraya adalah melalui tiga tahapan model air,yaitu reduksi data, penyajian data, dan varifikasi.Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data,memilah-milahya menjadikan satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang peting dan apa yang dipelajari serta

memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.(Miles & Huberman (1992:16))

Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengorganisir kedalam kategori,menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun prosedur pengembangannya data yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data *collecting*, yaitu proses pengumpulan data.
- b. Data *Editing*, yaitu proses pembersihan data, artinya memeriksa kembali jawaban apakah cara menjawabnya sudah benar.
- c. Data *Reductig*, yaitu data yang di sederhanakan, diperkecil, dirapikan dan atur ulang di buang yang salah.
- d. Data *Display*, yaitu penyajian data dalam bentuk deskriptif verbalitas.
- e. Data *verifikasi* , yaitu pemeriksaan kembali dari pengulangan data.
- f. Data *konklusi*, yaitu perumusan kesimpulan hasil penelitian yang di sajikan, baik perumusan secara umum atau khusus.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ranga

1. Sejarah Desa

Desa Ranga merupakan salah satu Desa Adat yang mana aturan dan hukum adat saling berdampingan dengan aturan dan hukum pemerintah Desa. Namun informasi mengenai sejarah pembentukan dan perkembangan desa ranga belum tersedia dengan dokumen sehingga belum bisa dijabarkan.

2. Kondisi Geografi Desa

Secara cluster Badan Pusat Statistik Kab. Enrekang Desa Ranga termasuk dalam Cluster Perdesaan, letak Desa Ranga jauh dari ibu kota Kabupaten, termasuk salah satu wilayah yang berada dalam pemerintahan Kecamatan Enrekang Letak Desa Ranga yang berjauhan Dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang tepatnya ± 8 Km arah barat Kabupaten Enrekang.

Desa Ranga termasuk satu dari 12 Desa dan Kelurahan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini termasuk daerah dataran tinggi terletak kurang lebih 8 KM dari ibukota Kabupaten Enrekang dengan luas wilayah 40 KM².

Desa Ranga secara administrasi terbagi menjadi 3 (Tiga) Dusun yakni: Dusun Ranga, Dusun Tirowali dan Dusun Lembong, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kaluppini, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tokkonan, Sebelah Selatan Kecamatan Bungi, Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lewaja. Secara keseluruhan luas desa Ranga adalah $\pm 40 \text{ KM}^2$.

3. Kondisi Sosial Budaya Desa

Secara umum Kondisi sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya:

Kondisi Demografis /Kependudukan, berdasarkan data AKP (Analisa Kependudukan Partisipatif) Pada tahun 2023 jumlah Penduduk Desa Ranga, berjenis Kelamin Laki-laki=628 Jiwa, berjenis Kelamin Perempuan = 543 Jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Ranga.

BUMDes Ranga

1. Sejarah pembentukan BUMDes Ranga

Dalam rangka mengoptimalkan seluruh pengelolaan potensi desa serta meningkatkan usaha-usaha masyarakat desa dan pembukaan lapangan kerja yang seluas-luasnya di desa untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa, maka salah satu program unggulan pemerintah desa Ranga adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Adapun yang menjadi potensi utama desa adalah sektor pertanian dan pembangunan dimana sebagian besar awrga Desa Ranga berprofesi sebagai petani, namun yang menjadi kedauletan dalam pengembangan sektor tersebut utama adalah permodalan melalui BUMDes, Pemerintah Desa hadir untuk mengembangkan potensi namun karena masih sangat minimnya peralatan penunjang menyebabkan pengembangan potensi Desa tersebut bergerak lambat.

Badan Usaha Milik Desa di Desa Ranga sebagai alat pelaksana Pemerintah Desa di bidang perekonomian dan pendapatan desa, Dalam rangka meningkatkan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes desa Ranga salah satu Bumdes di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Ranga didirikan dengan maksud antara lain membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang

penyediaan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesempatan berusaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Desa dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai wadah unit desa, sebagai pusat pelayanan ekonomi dan mewujudkan satu kesatuan ekonomi warga masyarakat Ranga dan sekitarnya, sebagai fungsi lembaga atau badan usaha yang bersifat memberikan pelayanan, menjalankan kemanfaatan umum dalam pembangunan perekonomian desa.

BUMDes Ranga menggunakan sistem akuntansi masih sangat sederhana dan belum dapat menyajikan pelaporan keuangan yang tepat sehingga akuntabilitas keuangan dipandang masih sangat lemah. Pengelolaan keuangan Bumdes masih menggunakan sistem pembukuan yang sederhana dan belum mencerminkan pelaporan keuangan yang sistematis dan akurat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang diperkenankan, Penyajian laporan keuangan belum tepat yang kemudian berdampak pada kinerja dan posisi keuangan entitas.

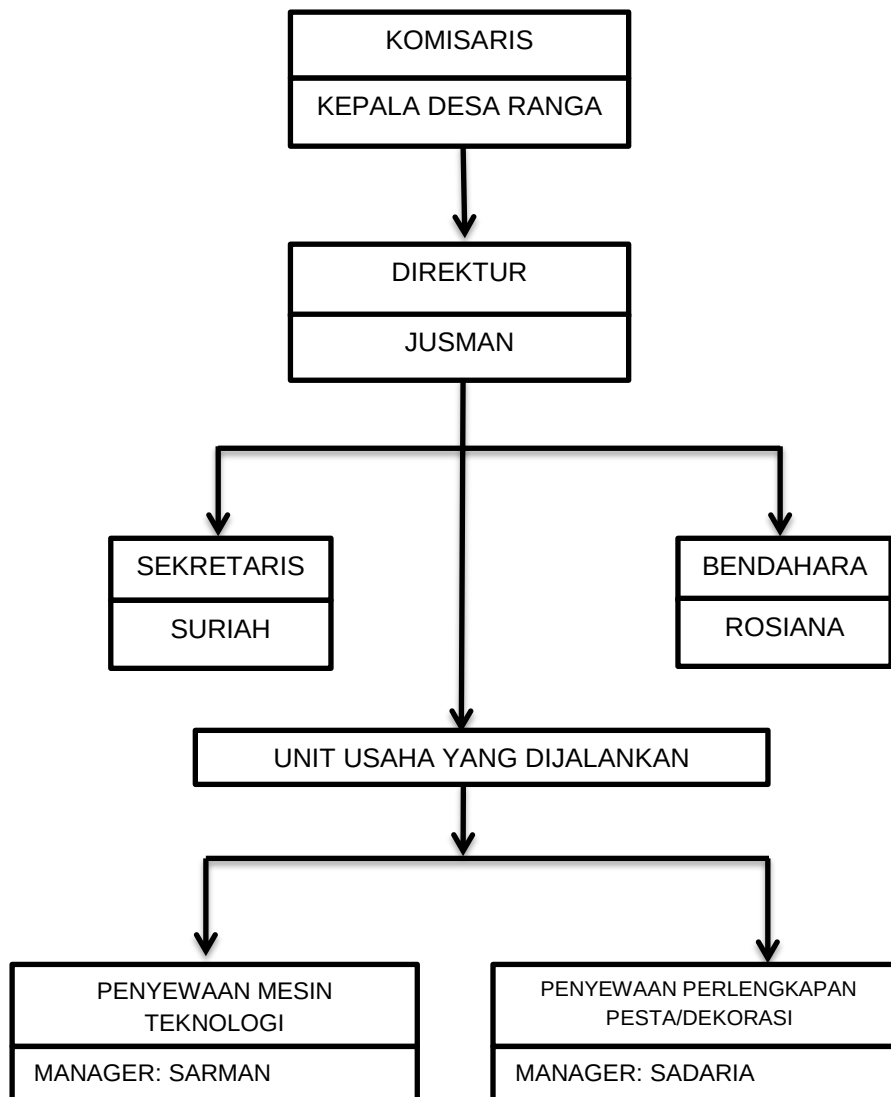
Visi, Misi dan Tujuan BUMDes Ranga

- a. Visi BUMDes Ranga adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ranga.
- b. Misi BUMDes Ranga adalah untuk memudahkan perputaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan

memudahkan masyarakat Desa Ranga dalam mendapatkan modal usaha dalam skala kecil dan berimbang sesuai dengan keberadaan modal yang dikelola BUMDes.

- c. Maksud pendirian BUMDes Ranga adalah untuk menjadi penyedia barang dan jasa bagi masyarakat berupa pelayanan ekonomi guna meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Tujuan pendirian BUMDes Ranga adalah meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Gambar 4.1
Struktur BUMDes



Maksud pendirian BUMDes Ranga adalah untuk menjadi penyedia barang dan jasa bagi masyarakat berupa pelayanan ekonomi guna meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Tujuan pendirian BUMDes Ranga adalah meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan Adapun tugas dan wewenang pengurus Badan Usaha Milik Desa berdasarkan struktur diatas yaitu:

1. Komisaris

a. Tugas komisaris menurut pasal 13 peraturan desa Ranga nomor 5 tahun 2022 bertugas :

- 1) Memberi nasehat kepada Direktur dan kepala unit usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.
- 2) Memberi saran dan pendapat dalam pengelolaan BUMDes.
- 3) Mengawasi/melaksanakan pengendalian kepada kepada Direktur dan Kepala unit usaha, dalam pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes.
- 4) Mengusahakan peningkatan kegiatan usaha BUMDes di setiap unit usaha.

b. Wewenang komisaris menurut pasal 14 peraturan desa Ranga nomor 5 tahun 2022 :

- 1) Meminta penjelasan dari Direksi/Pengurus unit BUMDes Ranga mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes Ranga.
- 2) Mencegah/melindungi seluruh kegiatan BUMDes Ranga terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan kegiatan dan citra BUMDes Ranga.
- 3) Menjadi negosiator yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga.

2. Direktur

a. Tugas direktur menurut pasal 20 peraturan desa Ranga nomor 5 tahun 2022 :

- 1) Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDes untuk kepentingan BUMDes dan sesuai dengan maksud dan tujuannya serta mewakili BUMDes di dalam dan/atau diluar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMDes, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDes.

- 3) Menyusun laporan semesteran pengelolaan Usaha BUMDes untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas.
 - 4) Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDes untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas.
 - 5) Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDes kepada penasihat.
 - 6) Menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDes kepada Musyawarah Desa.
 - 7) Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.
- b. Wewenang direktur menurut pasal 19 peraturan desa Ranga nomor 5 tahun 2022 bertugas :
- 1) Direktur memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali [aling banyak 2 kali masa jabatan dengan perimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

2) Masa jabatan direktur BUMDes pertama dihitung sejak diberlakukannya perubahan perdes pendirian BUMDes Ranga.

3. Sekretaris bertugas :

- a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUMDes.
- b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan BUMDes.
- c. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan.
- d. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUMDes.

4. Bendahara bertugas :

- a. Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMDes.
- b. Menggali sumber-sumber keuangan (*fundraising*) yang menambah sumber penghasilan BUMDes.
- c. Membuat laporan keuangan BUMDes dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUMDes.

5. Pelaksana Operasional atau Direksi menurut pasal 15 peraturan desa Ranga nomor 5 tahun 2022 bertugas :

- a. Mengembangkan dan membina seluruh kegiatan usaha agar tumbuh dan berkembang.

- b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan kebutuhan ekonomi warga yang adil dan merata.
- c. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian/keuangan baik pemerintah maupun non pemerintah, dan kerja sama antar desa, atas dasar saling menguntungkan.
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendapatan asli desa.
- e. Menghimpun dan membuat laporan bulanan dari seluruh kegiatan unit usaha.
- f. Melaporkan perkembangan usaha kepada masyarakat minimal 2 kali dalam setahun, melalui kegiatan bersama warga dan pemerintah desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. laporan Keuangan BUMDes Desa Ranga

Laporan pengeluaran BUMDes Desa Ranga tahun 2023 menyajikan rincian seluruh alokasi dana yang dikeluarkan untuk berbagai kebutuhan operasional dan proyek selama periode tertentu. Laporan ini mencakup biaya untuk pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji karyawan, pemeliharaan aset, dan investasi dalam pengembangan usaha. Setiap pengeluaran dicatat dengan jelas, termasuk tanggal, jenis pengeluaran, dan jumlah biaya, serta disertai dengan dokumen pendukung seperti faktur dan kwitansi.

Dengan laporan ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes dapat terjaga, memungkinkan pemantauan yang efektif dan evaluasi kinerja keuangan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 5.1
Neraca Keuangan BUMDes Desa Ranga

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	100.000.000	
Total Aset Lancar	100.000.000	
Aset Tetap		
Unit Usaha Penyewaan Alat Mesin Teknologi	16.000.000	
Unit Usaha Penyewaan Tata Rias Pengantin	40.000.000	
Total Aset Tetap	56.000.000	
Total Aset	156.000.000	
Kewajiban		
Biaya Operasional		
Biaya Gaji Karyawan		10.000.000
Biaya Pengambilan Barang		2.000.000
Bahan Bakar		2.000.000
Total Biaya Operasional		14.000.000
Total Kewajiban		14.000.000
Ekuitas		
Modal Usaha		86.000.000
Laba Ditahan		56.000.000
Total Ekuitas		142.000.000
Laba/Rugi		156.000.000

Sumber: Keuangan BUMDes Desa Ranga Tahun 2023

Pendapatan BUMDes Desa Ranga terdiri dari Bantuan Modal Usaha sebesar Rp 100.000.000. Setelah mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 14.000.000, BUMDes Desa Ranga mencatat laba bersih sebesar Rp 86.000.000. Dengan kata lain, setelah dikurangi biaya operasional, BUMDes berhasil memperoleh laba bersih yang signifikan, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan potensi keberhasilan dalam operasionalnya.

Neraca keuangan BUMDes Desa Ranga menunjukkan bahwa total aset yang dimiliki oleh lembaga tersebut adalah sebesar

Rp100.000.000. Dari jumlah ini, aset lancar terdiri dari kas dan setara kas yang bernilai Rp100.000.000. Sementara itu, aset tetap terdiri dari dua unit usaha, yaitu Unit Usaha Penyewaan Alat Mesin Teknologi dan Unit Usaha Penyewaan Tata Rias Pengantin, yang masing-masing bernilai Rp16.000.000 dan Rp40.000.000. Total nilai aset tetap mencapai Rp56.000.000. Dengan demikian, total aset yang dimiliki BUMDes Desa Ranga adalah sebesar Rp100.000.000, yang terdiri dari kombinasi aset lancar dan aset tetap.

Ekuitas suatu entitas dengan total jumlah sebesar Rp100.000.000. Pada bagian kewajiban, tertera biaya operasional sebesar Rp14.000.000. Ini menunjukkan bahwa total kewajiban yang dimiliki oleh entitas tersebut adalah Rp14.000.000. Di sisi ekuitas, terdapat modal usaha yang berjumlah Rp86.000.000.

Dengan demikian, total ekuitas yang dimiliki entitas adalah Rp86.000.000. Penjumlahan total kewajiban dan ekuitas menghasilkan angka Rp100.000.000, yang mencerminkan total kewajiban dan ekuitas secara keseluruhan. Penyeimbangan antara kewajiban dan ekuitas ini menunjukkan bahwa seluruh kewajiban entitas telah dibiayai sepenuhnya oleh ekuitas yang ada.

2. Sistem Pengelolaan Keuangan Bumdes Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

a. Transparansi Laporan Keuangan BUMDes

Sistem pengelolaan keuangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Desa Ranga saat ini menghadapi tantangan signifikan

karena tidak adanya sistem pencatatan keuangan yang terstruktur. Ini berarti bahwa setiap transaksi keuangan, baik itu pemasukan maupun pengeluaran, tidak dicatat secara sistematis dan teratur. Akibatnya, BUMDes Desa Ranga kesulitan dalam memantau arus kas, membuat laporan keuangan yang akurat, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana. Tanpa catatan yang jelas, sulit untuk melakukan analisis keuangan yang dapat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Transparansi laporan keuangan merupakan salah satu aspek krusial yang saat ini menjadi tantangan besar bagi BUMDes Desa Ranga. Ketidakmampuan BUMDes ini dalam mencatat transaksi keuangan dengan baik mengakibatkan laporan keuangan yang disusun tidak dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan organisasi. Seperti:

- a. Laporan Keuangan Tidak Akurat: BUMDes Desa Ranga tidak dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan karena tidak adanya pencatatan transaksi yang baik.
- b. Kesulitan dalam Pengambilan Keputusan: Data keuangan yang tidak akurat menghambat analisis keuangan dan proses perencanaan, yang mengakibatkan pengambilan keputusan strategis menjadi sulit.

- c. Rendahnya Akuntabilitas: Tanpa pencatatan yang terstruktur, akuntabilitas dalam pengelolaan dana menurun, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes berkurang.
- d. Minimnya Keterampilan Akuntansi Pengelola: Pengelola BUMDes tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam pencatatan keuangan, menyebabkan laporan keuangan yang tidak sesuai standar.
- e. Audit Tidak Efektif: Ketidakakuratan laporan keuangan membuat audit, baik internal maupun eksternal, menjadi sulit dan kurang efektif.

Selain itu, ketidakmampuan pengelola dalam menjalankan fungsi akuntansi secara efektif memperparah masalah ini. Minimnya pemahaman dan keterampilan dalam pencatatan keuangan mengakibatkan laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan standar akuntansi, sehingga transparansi dan pengendalian internal menjadi lemah.

Faktor pendidikan dan kurangnya pelatihan formal dalam bidang akuntansi juga menjadi penyebab utama permasalahan ini. Dengan tidak adanya sistem pencatatan yang terstruktur, risiko terjadinya penyimpangan atau kecurangan meningkat, dan audit keuangan, baik internal maupun eksternal, menjadi tidak efektif. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi berupa pelatihan dan pendidikan yang intensif bagi para pengelola BUMDes untuk

meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.

Kurangnya sistem pencatatan ini juga berdampak pada akuntabilitas dan pengendalian internal di BUMDes Desa Ranga. Tanpa dokumentasi yang memadai, ada risiko tinggi terhadap kemungkinan kecurangan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Para pengurus BUMDes mungkin tidak memiliki gambaran yang jelas tentang posisi keuangan mereka, sehingga membuat keputusan strategis menjadi lebih sulit. Selain itu, audit internal dan eksternal menjadi lebih rumit dan kurang efektif, karena ketidakakuratan data keuangan dapat mengaburkan hasil audit.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi BUMDes Desa Ranga untuk mengimplementasikan sistem pencatatan keuangan yang terstruktur. Langkah pertama adalah mendigitalisasi proses pencatatan dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi atau sistem manajemen keuangan yang sesuai. Pelatihan bagi pengurus BUMDes juga perlu dilakukan agar mereka dapat memahami dan menjalankan sistem pencatatan dengan benar. Dengan sistem yang baik, BUMDes Desa Ranga akan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan mereka, yang pada gilirannya akan mendukung keberlanjutan dan kesuksesan usaha mereka.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada pengelola BUMDes Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang menyatakan Bahwa:

Laporan keuangan BUMDes saat ini belum memberikan informasi yang jelas dan lengkap karena pencatatan keuangan belum dilakukan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengelola BUMDes Desa Ranga Kecamatan Enrekang, terdapat masalah mendasar dalam pengelolaan keuangan organisasi. Laporan keuangan yang disajikan saat ini tidak mampu memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai kondisi keuangan BUMDes. Hal ini menimbulkan hambatan serius dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan keuangan karena data keuangan yang ada tidak akurat dan tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya.

Masalah utama yang dihadapi oleh BUMDes Desa Ranga adalah kurangnya pemahaman akuntansi dari para pengelola keuangan. Ketidakmampuan untuk melakukan pencatatan keuangan secara sistematis dan teratur menunjukkan bahwa pengelola keuangan BUMDes belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam bidang akuntansi. Ini mengakibatkan penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai

standar, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BUMDes.

Selain itu, faktor pendidikan yang belum memadai dari para pengelola BUMDes Desa Ranga turut berkontribusi pada masalah pencatatan keuangan yang kurang baik. Tanpa pelatihan dan pendidikan yang tepat, para pengelola kesulitan dalam memahami pentingnya pencatatan keuangan yang baik dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan organisasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengelola melalui pelatihan dan pendidikan formal dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan menjadi kebutuhan mendesak agar BUMDes dapat beroperasi secara lebih efektif dan efisien.

b. Keterbandingan (*Comparability*): Laporan keuangan BUMDes

Penting untuk memulai pencatatan keuangan dengan baik agar laporan keuangan dapat mencerminkan transaksi dan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dengan pencatatan yang rapi, BUMDes akan lebih mudah mengelola anggaran, memantau arus kas, dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang valid.

Langkah pertama yang harus diambil adalah menyusun sistem pencatatan keuangan yang sederhana namun efektif. Pengelola BUMDes perlu dilatih dalam metode pencatatan dan

pelaporan yang benar untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak terkait.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada pengelola BUMDes Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang menyatakan Bahwa:

Kami juga merasa laporan keuangan belum mudah dipahami dan bisa membingungkan karena pencatatannya belum teratur.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa pencatatan keuangan di BUMDes Desa Ranga masih belum teratur. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam melacak transaksi keuangan dan memantau arus kas secara akurat. Tanpa pencatatan yang teratur, manajemen BUMDes menghadapi tantangan dalam menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan akurat, yang pada akhirnya menghambat pengambilan keputusan yang tepat.

Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan di kalangan pengelola BUMDes Desa Ranga masih terbatas. Beberapa pengelola mungkin belum memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam bidang keuangan atau akuntansi, sehingga menyulitkan mereka untuk memahami pentingnya pencatatan yang akurat dan konsisten. Keterbatasan ini dapat berkontribusi pada kurangnya standar pencatatan yang memadai dan dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Selain masalah pencatatan, wawancara juga menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan BUMDes Desa Ranga seringkali sulit dipahami oleh para pengelola. Laporan yang rumit atau tidak jelas dapat membingungkan para pengelola yang memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah. Akibatnya, kemampuan pengelola untuk menggunakan laporan tersebut dalam merencanakan dan mengelola kegiatan BUMDes secara efektif menjadi terbatas.

Kondisi yang ada mengharuskan BUMDes Desa Ranga untuk mengambil langkah-langkah perbaikan yang signifikan. Salah satu solusinya adalah dengan menyediakan pelatihan keuangan bagi para pengelola agar mereka dapat memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi dan manajemen keuangan. Selain itu, perlu juga diterapkan sistem pencatatan yang lebih terstruktur dan mudah diikuti, serta penyederhanaan laporan keuangan agar lebih mudah dipahami. Dengan demikian, BUMDes dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data keuangan yang akurat.

Dengan adanya pencatatan yang baik, BUMDes Desa Ranga dapat mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran secara lebih jelas, serta memantau perkembangan keuangan secara lebih efektif. Ini juga akan meningkatkan

akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada pengelola BUMDes Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang menyatakan Bahwa:

Saat ini, kami belum memiliki pencatatan yang memadai untuk laporan keuangan, sehingga sulit untuk membandingkan laporan keuangan tahun ini dengan tahun sebelumnya

Desa Ranga saat ini menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan laporan keuangan mereka. Dari hasil wawancara dengan pihak terkait, diketahui bahwa desa ini belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengelola dan memantau transaksi keuangan secara efektif. Ketiadaan sistem pencatatan yang baik dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas keuangan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Ketidakmampuan untuk membandingkan laporan keuangan dari tahun ke tahun merupakan salah satu dampak utama dari kurangnya sistem pencatatan yang memadai. Tanpa catatan yang terstruktur dan komprehensif, desa tidak dapat mengidentifikasi tren atau pola dalam pengeluaran dan pendapatan. Hal ini menyulitkan dalam membuat keputusan keuangan yang tepat, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan merencanakan

program pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai akibatnya, evaluasi kinerja keuangan desa menjadi terhambat.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi telah diusulkan. Salah satunya adalah pengembangan dan implementasi sistem pencatatan keuangan yang lebih baik. Sistem ini harus sederhana, namun mampu merekam semua transaksi keuangan secara detail. Pelatihan dan pendampingan kepada aparat desa dalam penggunaan sistem ini juga menjadi hal penting untuk memastikan bahwa semua pihak terkait dapat memahami dan mengoperasikan sistem dengan benar. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal literasi keuangan menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan pencatatan yang akurat dan konsisten.

Dengan adanya sistem pencatatan yang baik, Desa Ranga akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka. Ini tidak hanya akan membantu dalam memantau kinerja keuangan secara lebih efektif, tetapi juga memungkinkan desa untuk melakukan perbandingan laporan keuangan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, desa dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data historis, mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan, dan merencanakan program pembangunan yang lebih baik. Solusi ini diharapkan dapat

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa

c. Konsistensi: Laporan keuangan BUMDes

Keterbandingan dalam laporan keuangan adalah prinsip penting yang memungkinkan pengguna laporan untuk membandingkan informasi keuangan dari periode ke periode atau antara entitas yang berbeda. Untuk mencapai keterbandingan, laporan keuangan harus konsisten dalam format dan metode akuntansi yang digunakan dari waktu ke waktu. Konsistensi ini mempermudah analisis tren, evaluasi kinerja, dan perbandingan dengan standar industri atau perusahaan sejenis.

Contoh penerapan keterbandingan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Metode Akuntansi Konsisten:

Jika perusahaan menggunakan metode depresiasi garis lurus untuk aset tetap pada tahun-tahun sebelumnya, metode yang sama harus diterapkan pada tahun-tahun berikutnya agar hasil laporan keuangan tetap konsisten dan dapat dibandingkan.

b. Format Laporan yang Seragam:

Struktur laporan laba rugi dan neraca harus tetap sama dari satu periode ke periode berikutnya. Misalnya, jika laporan laba rugi disusun dengan urutan pendapatan, biaya, dan laba bersih

pada tahun lalu, format yang sama harus digunakan pada tahun ini untuk memastikan keterbandingan yang akurat.

Dengan laporan keuangan yang dapat dibandingkan, manajemen dan pihak eksternal seperti investor atau kreditor dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan terukur. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya untuk mulai membangun sistem pencatatan yang sederhana namun efektif.

Sistem yang baik, kami akan bisa membuat laporan keuangan yang lebih akurat dan bermanfaat untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan BUMDes ke depan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada pengelola BUMDes Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang menyatakan Bahwa:

Karena pencatatan keuangan belum dilakukan dengan baik, laporan keuangan belum bisa memudahkan kami dalam melihat perubahan dari waktu ke waktu

Hasil wawancara di Desa Ranga menunjukkan bahwa pencatatan keuangan di BUMDes belum dilakukan dengan baik. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak dapat secara efektif digunakan untuk melihat perubahan keuangan dari waktu ke waktu. Kondisi ini dapat menghambat pengambilan keputusan yang tepat dan mengurangi tingkat akuntabilitas serta transparansi BUMDes. Akibatnya, kesulitan muncul dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau

masalah yang harus diatasi, yang selanjutnya dapat menghambat kemajuan dan perkembangan BUMDes itu sendiri.

Untuk mengatasi masalah ini, solusi yang dapat diimplementasikan meliputi pengembangan sistem pencatatan keuangan yang lebih terstruktur dan sistematis. Langkah pertama adalah memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pengelola BUMDes mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang akurat dan rutin. Selain itu, penggunaan teknologi seperti aplikasi keuangan atau perangkat lunak akuntansi sederhana dapat membantu memfasilitasi pencatatan yang lebih efisien dan efektif. Dengan adanya pencatatan yang baik, laporan keuangan akan menjadi lebih informatif dan dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan BUMDes secara berkala, sehingga memudahkan dalam melihat perubahan dan tren keuangan dari waktu ke waktu.

Untuk memperbaiki situasi ini, penting untuk segera mulai melakukan pencatatan keuangan dengan cara yang teratur dan konsisten. Dengan pencatatan yang baik, laporan keuangan akan lebih akurat dan berguna untuk pengambilan keputusan serta perencanaan masa depan BUMDes. Dari hasil wawancara yang

telah dilakukan pada pengelola BUMDes Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang menyatakan Bahwa:

Saat ini, BUMDes Desa Ranga belum menggunakan metode akuntansi yang terstandar setiap tahun dalam laporan keuangannya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BUMDes Desa Ranga belum menerapkan metode akuntansi yang terstandar dalam laporan keuangannya setiap tahun. Para pengelola BUMDes mengakui bahwa mereka tidak menggunakan prosedur akuntansi yang baku, yang berakibat pada kekurangan dalam akurasi dan transparansi laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa ada pemahaman yang kurang memadai mengenai pentingnya penerapan standar akuntansi yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa pengelola BUMDes di Desa Ranga belum sepenuhnya memahami metode akuntansi yang diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang konsisten dan akurat. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pencatatan transaksi, penyusunan laporan, dan pengawasan anggaran, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kredibilitas dan keberlanjutan BUMDes. Tanpa metode akuntansi yang jelas, pelaporan

keuangan menjadi tidak terstruktur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Pengelola BUMDes diperuntukkan untuk melakukan pelatihan dan bimbingan bagi pengelola BUMDes mengenai metode akuntansi standar yang berlaku. Implementasi sistem akuntansi yang terstandar dapat dilakukan dengan mengadopsi perangkat lunak akuntansi yang sesuai dan menyusun pedoman akuntansi yang jelas. Selain itu, perlu adanya pendampingan rutin dari tenaga ahli akuntansi untuk memastikan bahwa penerapan metode tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif. Ini akan membantu meningkatkan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas laporan keuangan BUMDes Desa Ranga.

d. Materialitas: Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

Materialitas dalam laporan keuangan merujuk pada sejauh mana informasi yang disajikan dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan tersebut. Informasi dianggap material jika kelalaian atau kesalahan dalam penyajiannya dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna laporan keuangan. Materialitas tidak hanya bergantung pada jumlah nominal tetapi juga pada sifat informasi tersebut. Misalnya, meskipun sebuah kesalahan dalam laporan keuangan mungkin tampak kecil dalam hal angka, jika itu berkaitan dengan masalah yang signifikan atau sensitif, seperti kepatuhan terhadap regulasi atau kontrak penting, maka informasi tersebut bisa menjadi

material. Contoh-contoh materialitas dalam laporan keuangan termasuk:

a. Pengungkapan Utang Kontinjensi:

Jika perusahaan memiliki potensi utang yang signifikan, misalnya dalam kasus litigasi yang sedang berlangsung, informasi ini harus diungkapkan dengan jelas karena dapat mempengaruhi pandangan pengguna laporan terhadap kesehatan finansial perusahaan.

b. Perubahan dalam Kebijakan Akuntansi:

Perubahan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi cara pengakuan pendapatan atau pengukuran aset harus diungkapkan secara detail, karena hal ini dapat mempengaruhi pemahaman pengguna laporan tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan.

c. Kesalahan Material dalam Pelaporan:

Kesalahan besar dalam pelaporan pendapatan atau biaya yang dapat mempengaruhi profitabilitas yang dilaporkan harus diperbaiki dan diungkapkan, karena hal ini dapat mempengaruhi keputusan investasi atau kredit dari pengguna laporan.

Informasi yang material harus disajikan secara transparan untuk memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat dan lengkap mengenai posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.

Pengelolaan keuangan di BUMDes Desa Ranga juga menghadapi tantangan besar karena tidak adanya pencatatan yang sistematis. Tanpa pencatatan yang baik, sulit untuk memantau arus kas, mengelola pengeluaran, dan membuat laporan yang akurat.

Untuk memperbaiki situasi ini, BUMDes perlu segera mengimplementasikan sistem pencatatan keuangan yang teratur dan menerapkan metode akuntansi yang terstandar. Ini akan membantu meningkatkan transparansi, akurasi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada pengelola BUMDes Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang menyatakan Bahwa:

Kami juga belum melihat adanya konsistensi dalam laporan keuangan BUMDes dari tahun ke tahun, karena pencatatan keuangan masih belum ada.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa di Desa Ranga, terdapat ketidakstabilan dan kekurangan dalam laporan keuangan BUMDes. Hal ini disebabkan oleh ketidakadaan pencatatan keuangan yang memadai. Ketidakhadiran sistem pencatatan yang sistematis membuat sulit untuk melacak transaksi keuangan dari tahun ke tahun, yang berimbas pada ketidakjelasan dalam laporan keuangan. Tanpa pencatatan yang baik, informasi tentang aliran kas, pendapatan, dan pengeluaran tidak dapat dipantau secara efektif, mengakibatkan laporan keuangan yang tidak konsisten dan sulit untuk diaudit atau dianalisis.

Dalam konteks BUMDes di Desa Ranga, konsistensi dalam laporan keuangan sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Ketidakmampuan untuk menghasilkan laporan yang konsisten dari tahun ke tahun dapat menyebabkan

kurangnya kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk anggota BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat. Konsistensi laporan keuangan memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap kinerja keuangan BUMDes, memudahkan perencanaan keuangan, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informasional. Dalam hal ini, pencatatan keuangan yang teratur dan sistematis menjadi kunci utama untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Untuk memperbaiki situasi ini, BUMDes di Desa Ranga perlusegera mengimplementasikan sistem pencatatan keuangan yang terstruktur. Hal ini dapat dilakukan dengan merancang format laporan yang standar dan melatih staf dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain itu, BUMDes harus menerapkan kebijakan pengendalian internal yang ketat untuk memastikan semua transaksi dicatat dengan benar dan tepat waktu. Penggunaan perangkat lunak akuntansi yang sesuai juga dapat membantu dalam mengotomasi proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Langkah-langkah ini akan meningkatkan akurasi, konsistensi, dan transparansi laporan keuangan BUMDes, serta mendukung pengelolaan yang lebih baik dan akuntabilitas yang tinggi.

Untuk memperbaiki situasi ini, penting bagi BUMDes Desa Ranga untuk segera memulai sistem pencatatan keuangan yang baik. Ini akan membantu memastikan bahwa laporan keuangan menjadi konsisten dan akurat, yang pada gilirannya akan mempermudah pengelolaan keuangan dan perencanaan masa depan.

Ya, informasi dalam laporan keuangan sangat penting untuk keputusan kami. Ini membantu kami mengetahui kondisi keuangan BUMDes dan membuat keputusan yang tepat untuk pengelolaan dan pengembangan usaha.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa di Desa Ranga, konsistensi dalam laporan keuangan BUMDes menjadi masalah utama yang mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas keuangan. Data yang tidak terstruktur dan kurangnya pencatatan yang sistematis mengakibatkan ketidakpastian dalam pemantauan aliran kas dan laporan keuangan. Hal ini berdampak negatif pada kemampuan BUMDes untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dan merencanakan pengembangan usaha secara efektif. Ketidakakuratan dalam laporan keuangan juga menghambat evaluasi kinerja keuangan dan membuat pengelolaan anggaran menjadi tidak efisien, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap BUMDes.

Untuk mengatasi masalah ini, BUMDes Desa Ranga perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki sistem

pencatatan dan laporan keuangan. Implementasi sistem akuntansi yang terstandarisasi dan pelatihan bagi staf keuangan dalam penggunaan metode akuntansi yang tepat akan sangat membantu. Selain itu, BUMDes harus menerapkan kebijakan internal yang memastikan konsistensi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, serta melakukan audit rutin untuk memastikan keakuratan data. Dengan langkah-langkah tersebut, BUMDes dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dari komunitas serta pemangku kepentingan, yang pada akhirnya akan mendukung pengelolaan dan pengembangan usaha yang lebih efektif.

e. Akuntabilitas Dan Tanggung Jawab: Laporan Keuangan Bumdes

Akuntabilitas dan tanggung jawab dalam laporan keuangan BUMDes merupakan aspek krusial yang memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan BUMDes tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan pihak terkait terhadap pengelolaan dana desa. Dalam konteks ini, laporan keuangan harus mencakup laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Penting bagi pengelola BUMDes untuk melakukan audit internal secara rutin dan menyajikan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh auditor independen untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data yang disajikan. Contoh implementasi akuntabilitas dan tanggung jawab dalam laporan keuangan BUMDes meliputi:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Berkala: Menyusun dan menyajikan laporan keuangan setiap triwulan dan tahunan yang mencakup laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan BUMDes.
- b. Audit Internal dan Eksternal: Melakukan audit internal secara rutin dan melibatkan auditor eksternal untuk memeriksa laporan keuangan, memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- c. Transparansi dalam Pelaporan: Menyediakan akses kepada masyarakat untuk melihat laporan keuangan BUMDes, termasuk detail pengeluaran dan pendapatan, guna menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
- d. Pengelolaan Dana dan Akuntansi yang Efisien: Menyusun sistem akuntansi yang efisien dan memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dengan jelas, serta mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, BUMDes dapat meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap program-program yang dijalankan.

Akuntabilitas dan tanggung jawab dalam laporan keuangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Laporan keuangan BUMDes harus mencerminkan secara akurat kondisi keuangan dan hasil operasional BUMDes, yang meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas.

Kuntabilitas mengacu pada kewajiban manajemen BUMDes untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan anggaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab mencakup kewajiban untuk mematuhi standar akuntansi dan peraturan yang berlaku, serta menjelaskan bagaimana keputusan-keputusan keuangan mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan laporan keuangan yang transparan dan akurat, BUMDes dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien.

Saat ini, kami belum memiliki pencatatan keuangan yang memadai. Jadi, sangat penting untuk menambahkan informasi yang lebih detail dan sistematis dalam laporan keuangan agar kami dapat memantau dan mengelola keuangan dengan lebih baik.

Saat ini, BUMDes Desa Ranga belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai. Ini berarti kami belum memiliki metode yang sistematis untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi. Tanpa pencatatan yang baik, sulit untuk mengetahui kondisi keuangan secara akurat.

Untuk memperbaiki situasi ini, kami perlu mulai mencatat semua transaksi keuangan dengan detail. Ini termasuk mencatat pemasukan, pengeluaran, dan berbagai transaksi lainnya secara teratur. Dengan cara ini, kita bisa memantau arus kas dan memahami penggunaan dana secara jelas. Laporan keuangan yang detail dan sistematis akan sangat membantu dalam pengelolaan keuangan. Kami akan dapat melihat pola pengeluaran, mendeteksi masalah lebih awal, dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang ada.

Secara keseluruhan, penambahan informasi yang lebih terstruktur dalam laporan keuangan akan memudahkan pemantauan dan pengelolaan keuangan BUMDes Desa Ranga. Ini juga akan membantu kami dalam merencanakan dan mengelola anggaran dengan lebih efektif.

Saat ini, saya merasa laporan keuangan BUMDes belum sepenuhnya akurat dan jujur. Kami belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang efektif, sehingga ada kemungkinan

data yang tercatat tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya.

Pengelola BUMDes Desa Ranga mengakui bahwa laporan keuangan saat ini belum sepenuhnya akurat dan jujur. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan sistem pencatatan keuangan yang efektif. Tanpa sistem yang baik, ada kemungkinan data yang tercatat tidak benar-benar mencerminkan keadaan sebenarnya.

Sistem pencatatan yang tidak efektif bisa mengakibatkan kesalahan atau ketidaklengkapan dalam laporan keuangan. Hal ini dapat memengaruhi keputusan yang diambil dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

Untuk memperbaiki situasi ini, perlu adanya implementasi sistem pencatatan keuangan yang lebih baik. Dengan sistem yang tepat, data keuangan akan lebih akurat dan dapat diandalkan. Ke depan, pengelola BUMDes perlu fokus pada pembuatan sistem pencatatan yang sistematis dan konsisten. Ini akan membantu memastikan laporan keuangan yang lebih akurat dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes.

Laporan keuangan saat ini belum menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik. Karena pencatatan keuangan belum efektif, kami menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa semua transaksi dan laporan keuangan dikelola dengan benar.

Laporan keuangan saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Desa Ranga belum optimal. Salah satu masalah utama adalah pencatatan keuangan yang

belum efektif. Akibatnya, kami kesulitan dalam memastikan bahwa semua transaksi keuangan tercatat dengan benar.

Masalah pencatatan ini berdampak pada akurasi laporan keuangan yang dihasilkan. Tanpa sistem pencatatan yang baik, informasi yang tersedia sering kali tidak lengkap atau tidak akurat, membuat kami sulit untuk mengambil keputusan finansial yang tepat.

Untuk mengatasi masalah ini, kami perlu mengimplementasikan sistem pencatatan yang lebih efektif. Ini termasuk penggunaan software akuntansi atau metode manual yang lebih teratur, serta pelatihan bagi pengelola keuangan agar mereka dapat mencatat transaksi dengan benar.

Dengan perbaikan dalam pencatatan keuangan, diharapkan laporan keuangan akan lebih transparan dan akurat, memungkinkan kami untuk mengelola keuangan BUMDes dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih informasional.

f. Asas Ekonomi Entitas: Laporan Keuangan Bumdes

Asas ekonomi entitas adalah prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa laporan keuangan harus mencerminkan posisi dan kinerja keuangan dari entitas yang berdiri sendiri secara terpisah dari pemilik atau entitas lain. Dalam praktek akuntansi, asas ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi suatu entitas

dilaporkan secara mandiri, tanpa mencampuradukkan dengan aktivitas pribadi pemilik atau entitas lain.

Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang posisi keuangan dan hasil operasi entitas tersebut. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditur, dan manajer, dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang terpisah dan terfokus pada entitas tersebut. Contoh lain adalah

- a. menyusun laporan keuangan secara terpisah dari laporan keuangan lain atau badan usaha yang mungkin dikelola oleh anggotanya.

Laporan ini hanya akan menunjukkan hasil operasi dan posisi keuangan koperasi tersebut, yang memungkinkan anggota dan pihak terkait lainnya untuk menilai kinerja koperasi secara spesifik.

- b. laporan keuangan yang disusun harus mencerminkan pendapatan dan pengeluaran serta aset dan kewajiban yang berkaitan langsung dengan aktivitas,

Tanpa mencampurkan data dari proyek atau unit usaha lain yang ada di desa tersebut. Ini penting agar laporan keuangan memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan finansial dan kinerja operasional entitas tersebut secara mandiri.

Laporan keuangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan dokumen yang penting untuk menilai kinerja dan kesehatan finansial dari entitas tersebut. Dalam laporan ini, terdapat beberapa elemen utama seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan, pendapatan, dan pengeluaran BUMDes. Neraca menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas entitas pada suatu titik waktu tertentu, sedangkan laporan laba rugi menguraikan pendapatan dan biaya selama periode tertentu untuk menghitung laba atau rugi bersih.

Laporan arus kas mengungkapkan aliran kas masuk dan keluar, memberikan informasi tentang likuiditas dan kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Melalui laporan keuangan ini, pengelola BUMDes dapat memantau kesehatan finansial, membuat keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas kepada masyarakat desa

Saat ini, laporan keuangan BUMDes kami belum ada pencatatan yang teratur, jadi kami belum bisa memastikan akurasi dan kejujurannya.

Saat ini, BUMDes Desa Ranga belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang teratur. Hal ini membuat kami sulit untuk melacak dan memverifikasi setiap transaksi keuangan yang terjadi. Tanpa pencatatan yang baik, laporan keuangan yang dihasilkan tidak bisa dipastikan akurat. Karena tidak ada

pencatatan yang konsisten, kami menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa semua informasi keuangan tercatat dengan benar. Ini juga berdampak pada kemampuan kami untuk mengevaluasi kesehatan finansial BUMDes secara efektif.

Keberadaan sistem pencatatan yang baik sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Tanpa sistem tersebut, kami tidak dapat memastikan kejujuran laporan keuangan kami.

Kami menyadari pentingnya memperbaiki masalah ini dan sedang mencari cara untuk mengimplementasikan sistem pencatatan yang lebih baik untuk memastikan laporan keuangan kami lebih akurat dan terpercaya di masa depan. Karena belum ada pencatatan keuangan yang memadai, laporan keuangan belum bisa menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik.

Langkah ini juga akan membantu kami dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang lebih berdampak positif. Kami akan terus berusaha untuk meningkatkan sistem pelaporan kami agar sesuai dengan standar yang diharapkan.

g. Pelaporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting)

Laporan berkelanjutan yang berfokus pada aspek keuangan, perusahaan menyoroti bagaimana strategi keberlanjutan mereka mempengaruhi kinerja finansial dan nilai jangka panjang perusahaan.

Laporan ini mencakup analisis dampak finansial dari inisiatif keberlanjutan, termasuk investasi dalam teknologi ramah lingkungan, pengelolaan risiko terkait perubahan iklim, dan efeknya terhadap profitabilitas serta efisiensi operasional.

Laporan ini juga mencakup informasi mengenai pengembalian investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap pencapaian target keuangan perusahaan. Contoh poin-poin dalam laporan berkelanjutan yang berfokus pada laporan keuangan dapat mencakup:

- a. Investasi dalam Teknologi Hijau: Mengalokasikan 10% dari anggaran tahunan untuk pengembangan teknologi ramah lingkungan yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya energi jangka panjang.
- b. Penghematan Biaya: Mencatat penghematan biaya sebesar \$2 juta per tahun akibat implementasi sistem pengelolaan energi yang lebih efisien, yang berkontribusi langsung pada peningkatan margin keuntungan.
- c. Dampak Risiko Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan: Menyusun proyeksi dampak finansial dari risiko terkait perubahan iklim, termasuk potensi biaya tambahan akibat peraturan lingkungan yang lebih ketat atau kerugian operasional terkait cuaca ekstrem.

d. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Mengungkapkan bagaimana kebijakan keberlanjutan mempengaruhi laporan keuangan tahunan dengan memberikan informasi detail tentang pengeluaran untuk inisiatif keberlanjutan dan dampaknya terhadap laba bersih perusahaan.

Dengan melaporkan aspek-aspek ini, perusahaan dapat menunjukkan bagaimana integrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis mereka berkontribusi pada pencapaian hasil keuangan yang positif dan memitigasi risiko finansial, serta membangun kepercayaan dengan investor dan pemangku kepentingan.

Pelaporan Berkelanjutan (*Sustainability Reporting*) dalam laporan keuangan BUMDes merupakan proses pengungkapan informasi terkait dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan operasional BUMDes. Tujuan utama dari pelaporan ini adalah untuk memberikan transparansi mengenai bagaimana BUMDes menjalankan praktik berkelanjutan yang berkontribusi pada pembangunan komunitas dan pelestarian lingkungan.

Informasi yang disampaikan mencakup kinerja dalam pengelolaan sumber daya alam, keterlibatan dalam kegiatan sosial, serta dampak ekonomi yang dihasilkan, seperti penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan adanya pelaporan berkelanjutan, BUMDes dapat menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan,

meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan.

Karena pencatatan keuangan di BUMDes kami belum ada, laporan keuangan kami saat ini belum bisa mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan secara maksimal. Kami berencana untuk memperbaiki hal ini ke depan.

Saat ini, di BUMDes Desa Ranga, kami belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai. Hal ini menyebabkan laporan keuangan kami belum bisa menggambarkan komitmen kami terhadap keberlanjutan secara optimal. Kami menyadari pentingnya pencatatan keuangan yang baik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Tanpa pencatatan yang tepat, sulit untuk memantau dan mengelola keuangan dengan efisien.

Untuk mengatasi masalah ini, kami berencana untuk segera mengimplementasikan sistem pencatatan keuangan yang terstruktur. Ini akan membantu kami dalam membuat laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Dengan perbaikan ini, kami berharap dapat meningkatkan manajemen keuangan dan menunjukkan komitmen kami terhadap keberlanjutan BUMDes di masa depan.

3. Tantangan Dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Keuangan Bumdes Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan BUMDes Desa Ranga mencakup masalah signifikan terkait dengan kurangnya pemahaman teknologi laporan keuangan oleh pegawai.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pegawai BUMDes mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan terintegrasi. Kurangnya pemahaman ini mengakibatkan penggunaan metode manual dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan, yang berpotensi menyebabkan kesalahan dan ketidakakuratan data finansial.

Hal ini tidak hanya memperlambat proses pelaporan tetapi juga menghambat kemampuan BUMDes untuk melakukan analisis keuangan yang efektif dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Sulit buat mengatur keuangan dengan efektif tanpa sistem pencatatan yang jelas, seringkali bikin kesalahan dalam pengelolaan dana.

a. Rendahnya Tingkat Literasi Keuangan Pengelola Keuangan

Rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan pengelola keuangan seringkali menjadi hambatan signifikan dalam pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan, terutama di organisasi seperti BUMDes. Kurangnya pemahaman tentang konsep dasar keuangan, seperti perencanaan anggaran, analisis laporan keuangan, dan pengelolaan arus kas, dapat mengakibatkan keputusan yang tidak tepat dalam pengalokasian sumber daya dan perencanaan keuangan.

Hal ini berpotensi menyebabkan inefisiensi, ketidakstabilan finansial, dan kurangnya akuntabilitas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja organisasi dan kepercayaan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan literasi keuangan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan mendukung keberlanjutan organisasi. Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui pada pengelola BUMDes Desa Ranga diketahui bahwa:

Kesalahan keuangan yang sering terjadi di BUMDes Desa Ranga termasuk tidak mencatat transaksi dengan benar, salah menghitung biaya, dan tidak membuat laporan keuangan yang tepat. Hal ini bisa menyebabkan pengeluaran tidak terkontrol dan sulitnya mengevaluasi kinerja keuangan.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan pegawai BUMDes Desa Ranga, ditemukan beberapa kekurangan yang signifikan terkait pemahaman keuangan mereka. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah ketidakmampuan untuk mencatat transaksi dengan benar. Pegawai seringkali tidak mengikuti prosedur akuntansi yang standar, yang mengakibatkan pencatatan yang tidak akurat dan tidak konsisten. Hal ini berdampak langsung pada laporan keuangan yang dihasilkan, yang sering kali tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dari BUMDes. Ketidakakuratan dalam pencatatan ini menyebabkan kesulitan dalam mengontrol pengeluaran dan sulitnya melacak aliran kas, yang pada akhirnya mempengaruhi

kemampuan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dan strategis.

Selain itu, pegawai BUMDes Desa Ranga juga mengalami kesulitan dalam menghitung biaya secara tepat. Kesalahan dalam perhitungan biaya ini berpotensi mengakibatkan overbudgeting atau underbudgeting, yang dapat merugikan BUMDes baik dari sisi finansial maupun operasional. Kurangnya pemahaman ini diperparah dengan tidak adanya laporan keuangan yang tepat, sehingga sulit untuk mengevaluasi kinerja keuangan secara objektif. Akibatnya, pengeluaran tidak dapat dikendalikan dengan efektif dan tidak ada data yang cukup untuk melakukan analisis yang mendalam mengenai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan lebih lanjut dan penguatan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan di BUMDes Desa Ranga agar masalah-masalah ini dapat diatasi dan manajemen keuangan dapat dilakukan dengan lebih baik. Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui pada pengelola BUMDes Desa Ranga diketahui bahwa:

Kami mencoba mengatasi kurangnya pengetahuan keuangan dengan mengadakan pelatihan dan pembelajaran untuk staf. Selain itu, kami juga meminta bantuan dari pihak luar seperti konsultan atau instansi pemerintah yang bisa memberikan bimbingan.

Dalam usaha mengatasi kekurangan pemahaman keuangan di BUMDes Desa Ranga, kami telah mengimplementasikan

beberapa langkah strategis. Kami menyadari bahwa keterbatasan pengetahuan keuangan di kalangan staf dapat menghambat pengelolaan yang efektif, sehingga kami telah mengadakan pelatihan dan program pembelajaran terstruktur.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf mengenai konsep-konsep keuangan dasar, pengelolaan anggaran, serta penyusunan laporan keuangan yang akurat. Selain itu, kami juga menggandeng pihak luar seperti konsultan keuangan dan instansi pemerintah yang memiliki keahlian khusus dalam bimbingan keuangan. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan serta solusi praktis bagi staf dalam menghadapi tantangan terkait pengelolaan keuangan.

Upaya ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pencatatan keuangan yang selama ini kurang terstruktur, meningkatkan transparansi, dan pada akhirnya memperkuat akuntabilitas keuangan di BUMDes Desa Ranga.

b. Ketergantungan Pada Sumber Daya Manusia Terbatas

Ketergantungan pada sumber daya manusia terbatas merujuk pada situasi di mana sebuah organisasi atau komunitas sangat bergantung pada jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk menjalankan operasionalnya. Ketergantungan ini

sering kali menjadi tantangan signifikan, terutama jika sumber daya manusia yang ada tidak memadai atau kurang terampil.

Hal ini dapat mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Keterbatasan sumber daya manusia dapat menghambat inovasi, mempersulit pengambilan keputusan yang efektif, dan menyebabkan beban kerja yang tidak merata, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan organisasi secara keseluruhan.

Tantangan yang dihadapi staf termasuk keterbatasan dalam memahami laporan keuangan, sulitnya mencatat transaksi secara akurat, dan kurangnya alat bantu seperti software akuntansi yang memadai. Hal ini membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih rumit.

Tantangan utama yang dihadapi staf BUMDes Desa Ranga dalam pengelolaan keuangan melibatkan beberapa masalah kritis yang saling berhubungan. Pertama, terdapat keterbatasan signifikan dalam pemahaman laporan keuangan, yang menyebabkan staf kesulitan dalam menganalisis dan menginterpretasikan data keuangan secara efektif. Hal ini diperparah oleh masalah pencatatan transaksi yang sering tidak akurat, baik karena kurangnya keterampilan teknis maupun kesadaran akan pentingnya pencatatan yang benar.

Tambahan lagi, ketidaktersediaan alat bantu yang memadai, seperti software akuntansi yang tepat, semakin membebani

proses pengelolaan keuangan, menjadikannya lebih rumit dan rentan terhadap kesalahan. Kombinasi dari ketiga masalah ini mengakibatkan pengelolaan keuangan menjadi tidak efisien, menghambat transparansi, dan menambah risiko ketidakakuratan dalam pelaporan finansial BUMDes. Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui pada pengelola BUMDes Desa Ranga diketahui bahwa:

Saat ini, jumlah staf yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan di BUMDes Desa Ranga adalah dua orang. Mereka bertanggung jawab atas pencatatan, laporan, dan pengawasan keuangan sehari-hari.

Dalam wawancara dengan pegawai BUMDes Desa Ranga, terungkap bahwa pengelolaan keuangan saat ini ditangani oleh hanya dua orang staf yang secara langsung terlibat dalam pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan sehari-hari. Keterbatasan jumlah staf ini menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi pada kurangnya pemahaman keuangan di BUMDes Desa Ranga. Para staf ini menghadapi beban kerja yang berat karena mereka harus menangani berbagai aspek keuangan secara bersamaan, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan, yang sering kali melampaui kapasitas mereka.

Kurangnya pemahaman keuangan di BUMDes Desa Ranga disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, staf yang ada mungkin tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan khusus

dalam bidang keuangan, sehingga mereka menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengelola prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang kompleks. Kedua, terbatasnya jumlah staf menyebabkan kurangnya kesempatan untuk melakukan pemeriksaan dan pelatihan yang memadai, yang seharusnya dapat membantu meningkatkan kompetensi mereka dalam pengelolaan keuangan.

Ke depan, untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek dasar akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan pengelolaan anggaran. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih efisien untuk mengurangi beban kerja yang ada. Implementasi teknologi informasi, seperti perangkat lunak akuntansi yang sederhana namun efektif, juga dapat membantu dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan keuangan.

Langkah-langkah tambahan yang dapat diambil meliputi penambahan personel yang memiliki keahlian khusus dalam bidang keuangan untuk mendukung staf yang ada. Pengalaman dan pengetahuan tambahan ini akan membantu dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan meningkatkan

pemahaman serta keterampilan staf yang terlibat. Dengan demikian, BUMDes Desa Ranga dapat mengurangi kesalahan dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan transparansi, dan memastikan akuntabilitas yang lebih baik dalam pelaporan keuangan mereka.

c. Kurangnya Sistem Pencatatan Keuangan yang Terstruktur

Kurangnya sistem pencatatan keuangan yang terstruktur mengacu pada ketidakmampuan suatu entitas, seperti BUMDes, untuk mengatur dan mendokumentasikan transaksi keuangan secara sistematis dan teratur. Hal ini seringkali mengakibatkan kesulitan dalam melacak aliran kas, mengidentifikasi kesalahan, dan menyusun laporan keuangan yang akurat. Ketidakteraturan dalam pencatatan dapat mengganggu transparansi keuangan dan menurunkan akuntabilitas, sehingga menyulitkan manajer dan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan data keuangan.

Selain itu, kurangnya struktur dalam pencatatan keuangan dapat meningkatkan risiko kesalahan atau penyelewengan yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan finansial organisasi. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan sistem pencatatan yang terintegrasi dan terstandarisasi untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Dari

hasil wawancara yang dilakukan diketahui pada pengelola BUMDes Desa Ranga diketahui bahwa:

Sulit buat mengatur keuangan dengan efektif tanpa sistem pencatatan yang jelas, seringkali bikin kesalahan dalam pengelolaan dana.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan para pegawai BUMDes Desa Ranga, terungkap bahwa salah satu tantangan utama yang mereka hadapi adalah pengaturan keuangan yang kurang efektif akibat tidak adanya sistem pencatatan yang jelas. Sistem pencatatan yang tidak terstruktur dan minimnya penggunaan teknologi modern menyebabkan kesulitan dalam memonitor dan mengevaluasi aliran dana masuk dan keluar. Tanpa panduan yang konsisten, laporan keuangan sering kali tidak akurat, dan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis pun sulit didapatkan. Hal ini mengakibatkan pengelolaan keuangan yang kurang efisien dan dapat mempengaruhi kesehatan keuangan BUMDes secara keseluruhan.

Keterbatasan ini diperparah dengan kurangnya pelatihan dan pemahaman pegawai tentang pentingnya sistem pencatatan yang akurat dan efektif. Para pegawai BUMDes Desa Ranga mengakui bahwa mereka seringkali membuat kesalahan dalam pengelolaan dana karena tidak adanya sistem yang jelas untuk memandu mereka. Kesalahan tersebut tidak hanya berisiko

menimbulkan inefisiensi dalam alokasi dana, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi organisasi. Ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) dalam pencatatan keuangan semakin mempersulit situasi, mengingat SOP sangat penting untuk memastikan konsistensi dan akurasi dalam setiap proses keuangan.

Solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini mencakup pengembangan dan implementasi sistem pencatatan keuangan yang lebih baik serta pelatihan intensif bagi pegawai BUMDes Desa Ranga. Dengan sistem pencatatan yang jelas, pegawai akan lebih mudah dalam melacak setiap transaksi dan memastikan bahwa semua data keuangan dicatat dengan tepat. Pelatihan yang berkelanjutan juga diperlukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengelola dan melaporkan keuangan. Dengan demikian, BUMDes Desa Ranga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan mereka, mengurangi kesalahan dalam pengelolaan dana, dan pada akhirnya memperkuat posisi keuangan mereka.

d. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Staf

Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan staf merupakan tantangan signifikan yang dapat mempengaruhi kinerja dan efisiensi organisasi. Ketika staf tidak memiliki pengetahuan yang memadai atau keterampilan yang relevan,

mereka mungkin kesulitan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pekerjaan, penurunan produktivitas, dan kurangnya inovasi dalam menyelesaikan masalah.

Selain itu, keterbatasan ini seringkali menyebabkan kesenjangan dalam komunikasi dan koordinasi antar anggota tim, yang pada gilirannya dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi organisasi untuk melakukan pelatihan yang berkelanjutan dan menyediakan kesempatan bagi staf untuk mengembangkan keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan perkembangan industri.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui pada pengelola BUMDes Desa Ranga diketahui bahwa:

Pengetahuan dan keterampilan akuntansi staf yang kurang memadai sering bikin laporan keuangan jadi tidak tepat waktu dan kurang akurat.

Pengetahuan dan keterampilan akuntansi yang tidak memadai di kalangan staf BUMDes Desa Ranga merupakan salah satu masalah utama yang diidentifikasi selama wawancara. Banyak staf yang mengelola laporan keuangan tanpa pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi dasar. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan proses

pembukuan, sehingga mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kurangnya pelatihan khusus dan pendidikan berkelanjutan dalam bidang akuntansi di BUMDes Desa Ranga memperburuk situasi ini, karena staf tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan kompetensi mereka.

Akibat dari kekurangan tersebut, penyusunan laporan keuangan sering mengalami keterlambatan. Proses pengumpulan dan pencatatan data transaksi menjadi lambat karena staf harus berulang kali memeriksa dan memperbaiki kesalahan yang terjadi. Selain itu, minimnya pemahaman akan prosedur akuntansi membuat staf kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Keterlambatan ini tidak hanya mempengaruhi operasional internal BUMDes, tetapi juga mengganggu proses pengambilan keputusan dan transparansi informasi keuangan kepada pemangku kepentingan.

Ketidaktepatan waktu bukan satu-satunya dampak dari kurangnya pengetahuan akuntansi staf; akurasi laporan keuangan juga menjadi isu yang signifikan. Kesalahan dalam pencatatan dan pengklasifikasian transaksi, seperti salah penempatan akun atau salah penghitungan, mengakibatkan informasi keuangan yang dihasilkan menjadi tidak akurat. Akibatnya, laporan keuangan yang tidak akurat dapat memberikan gambaran yang salah mengenai kondisi keuangan BUMDes. Hal ini dapat

berujung pada keputusan manajerial yang tidak tepat, dan pada akhirnya, menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan BUMDes Desa Ranga. Solusi jangka panjang seperti program pelatihan intensif dan penerapan sistem akuntansi yang lebih baik diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

e. Keterbatasan Sumber Daya Teknologi

Keterbatasan sumber daya teknologi pada BUMDes Desa Ranga merupakan tantangan signifikan yang memengaruhi efektivitas operasional dan pengelolaan organisasi. Kurangnya akses terhadap teknologi modern, seperti perangkat keras yang memadai dan perangkat lunak yang mutakhir, membatasi kemampuan BUMDes dalam melakukan pencatatan keuangan secara akurat, analisis data, dan pelaporan yang transparan.

Ketergantungan pada metode manual dan kurangnya pelatihan dalam penggunaan teknologi digital juga memperlambat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko kesalahan dalam administrasi. Keterbatasan ini tidak hanya menghambat efisiensi operasional tetapi juga mempengaruhi potensi pengembangan dan pertumbuhan BUMDes, mengurangi daya saing dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui pada pengelola BUMDes Desa Ranga diketahui bahwa:

Tanpa teknologi yang cukup, pencatatan keuangan bisa jadi tidak akurat dan sering telat. Kebanyakan masih pake cara manual yang makan waktu.

Dari hasil wawancara dengan pegawai BUMDes Desa Ranga, ditemukan bahwa kurangnya pemahaman teknologi laporan keuangan menjadi salah satu penyebab utama ketidakakuratan dan keterlambatan dalam pencatatan keuangan. Sebagian besar pegawai masih mengandalkan metode manual dalam melakukan pencatatan keuangan. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang aplikasi dan perangkat lunak yang dapat membantu mengotomatiskan dan merapikan proses pencatatan keuangan. Akibatnya, proses ini memakan waktu lebih lama dan lebih rentan terhadap kesalahan manusia, seperti salah memasukkan angka atau informasi yang hilang.

Selain itu, terbatasnya akses ke pelatihan dan sumber daya teknologi menghambat kemampuan pegawai dalam mengadopsi sistem pencatatan yang lebih modern. Kurangnya investasi dalam infrastruktur teknologi juga menjadi hambatan signifikan. Tanpa akses ke perangkat keras yang memadai dan internet yang stabil, pegawai kesulitan untuk mengimplementasikan teknologi pencatatan yang lebih efisien. Hal ini memperburuk masalah keterlambatan dalam penyelesaian laporan keuangan, karena semua data harus dikumpulkan dan diverifikasi secara manual.

Kurangnya pemahaman tentang pentingnya teknologi dalam manajemen keuangan juga menjadi masalah. Banyak pegawai yang masih merasa nyaman dengan metode manual dan enggan beralih ke sistem yang lebih canggih. Hal ini disebabkan oleh ketakutan akan perubahan dan kurangnya pengetahuan tentang keuntungan jangka panjang yang bisa didapat dari penggunaan teknologi. Tanpa dorongan dan pelatihan yang memadai, pegawai cenderung mempertahankan praktik yang ada, meskipun tidak efisien, yang pada akhirnya berdampak negatif pada akurasi dan ketepatan waktu laporan keuangan BUMDes Desa Ranga.

f. Kurangnya Pengawasan dan Kontrol Internal:

Pengawasan dan kontrol internal pada BUMDes Desa Ranga merupakan mekanisme krusial untuk memastikan tata kelola yang baik dan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta operasional. Pengawasan internal mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan atau penyimpangan dalam proses administratif dan keuangan, seperti audit internal dan pemantauan berkala terhadap laporan keuangan.

Kontrol internal, di sisi lain, melibatkan penerapan prosedur dan kebijakan yang efektif untuk menjaga integritas transaksi,

termasuk pembatasan akses, verifikasi ganda, serta pelatihan bagi staf mengenai praktik keuangan yang benar. Dengan adanya sistem pengawasan dan kontrol internal yang baik, BUMDes Desa Ranga dapat meningkatkan akuntabilitas, mengurangi risiko penyalahgunaan dana, dan memastikan bahwa semua aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui pada pengelola BUMDes Desa Ranga diketahui bahwa:

Bisa dengan nambahin aturan pengawasan, rutin cek laporan keuangan, dan evaluasi kinerja buat pastiin semuanya berjalan sesuai rencana.

Dalam wawancara dengan pegawai BUMDes Desa Ranga, terungkap bahwa salah satu kekurangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang teknologi laporan keuangan. Banyak pegawai yang merasa kesulitan dalam menggunakan perangkat lunak akuntansi atau sistem berbasis teknologi untuk menyusun laporan keuangan. Hal ini berdampak pada akurasi dan efisiensi pelaporan keuangan yang dihasilkan, yang seringkali tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Kekurangan pemahaman ini juga menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan, sehingga sulit untuk melakukan analisis yang tepat waktu terhadap kondisi keuangan BUMDes.

Selain itu, ketidakmampuan untuk memanfaatkan teknologi secara optimal mengakibatkan kurangnya transparansi dalam proses pelaporan keuangan. Pegawai yang kurang terampil dalam teknologi sering kali membuat kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan data, yang pada gilirannya menghambat proses audit dan pengawasan. Kurangnya transparansi ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan pihak-pihak terkait terhadap pengelolaan keuangan BUMDes. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pelatihan yang lebih intensif tentang penggunaan teknologi laporan keuangan dan pembaruan sistem yang digunakan.

Sebagai langkah perbaikan, penting untuk menambahkan aturan pengawasan yang ketat, melakukan pengecekan rutin terhadap laporan keuangan, dan mengevaluasi kinerja secara berkala. Dengan adanya aturan pengawasan yang jelas, pegawai diharapkan dapat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan benar. Pengecekan rutin dan evaluasi kinerja akan membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan sejak dini, serta memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai rencana. Hal ini tidak hanya meningkatkan akurasi laporan keuangan tetapi juga membangun kepercayaan dan kredibilitas BUMDes di mata masyarakat dan pemangku kepentingan.

4. Pengelolaan Keuangan Bumdes Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

a. Pengelolaan keuangan belum maksimal

Pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang memainkan peran krusial dalam peningkatan perekonomian masyarakat setempat. BUMDes, sebagai badan usaha milik desa, memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal melalui pengelolaan yang efektif dan efisien. Dalam konteks Desa Ranga, pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu memperkuat fondasi ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan kesejahteraan. Namun, tanpa sistem pencatatan keuangan yang memadai, manfaat tersebut sulit terwujud sepenuhnya.

Implementasi sistem akuntansi yang terstruktur dan konsisten merupakan langkah awal yang penting untuk memperbaiki pengelolaan keuangan BUMDes. Penggunaan perangkat lunak akuntansi atau sistem pencatatan manual yang tepat dapat memfasilitasi pencatatan transaksi keuangan dengan lebih akurat dan transparan. Dengan adanya laporan keuangan yang jelas, pengelola BUMDes dapat memantau arus kas, mengelola anggaran, dan membuat keputusan yang lebih baik dalam merencanakan kegiatan ekonomi dan investasi yang

mendukung pertumbuhan desa. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mitra usaha terhadap BUMDes.

Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan BUMDes. Partisipasi aktif warga desa dalam perencanaan dan evaluasi penggunaan dana akan memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas komunitas. Keterlibatan ini juga dapat mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan dana dan meningkatkan efektivitas program-program ekonomi. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan keuangan BUMDes dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan perekonomian Desa Ranga dan kesejahteraan masyarakatnya

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada pengelola BUMDes Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang menyatakan Bahwa:

Saat ini, BUMDes Desa Ranga belum memiliki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang terstruktur. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya sistem yang jelas untuk mencatat semua transaksi keuangan dan kesulitan dalam melaporkan keuangan secara akurat.

Di Desa Ranga, BUMDes saat ini menghadapi tantangan signifikan terkait pencatatan dan pelaporan keuangan. Kurangnya sistem pencatatan yang terstruktur membuat sulit untuk melacak

semua transaksi keuangan yang terjadi. Tanpa sistem yang jelas, pencatatan transaksi menjadi tidak konsisten dan rentan terhadap kesalahan, yang pada akhirnya berdampak pada akurasi laporan keuangan. Hal ini menghambat kemampuan BUMDes untuk mengevaluasi kinerja keuangan secara efektif dan membuat keputusan strategis berdasarkan data yang akurat.

Selain itu, ketidakmampuan untuk melaporkan keuangan secara akurat berpotensi menimbulkan masalah dalam transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat merusak kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa dan pihak-pihak yang terlibat dalam pendanaan atau kerjasama dengan BUMDes. Ini juga dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi persyaratan regulasi atau mendapatkan bantuan tambahan dari pemerintah dan lembaga lainnya.

Untuk mengatasi tantangan ini, BUMDes Desa Ranga perlu segera mengimplementasikan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang terstruktur. Langkah pertama yang harus diambil adalah mengembangkan dan menerapkan prosedur pencatatan yang standar, termasuk penggunaan perangkat lunak akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes. Selain itu, penting untuk melatih staf dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan yang benar serta memantau dan mengevaluasi sistem secara berkala

untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem yang baik, BUMDes dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan dalam membuat keputusan yang lebih baik untuk kemajuan desa.

b. Tantangan Pengelolaan Keuangan Bumdes Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kejelasan dalam pencatatan transaksi dan kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Tanpa sistem yang baik, laporan keuangan menjadi tidak konsisten dan mungkin tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi BUMDes Desa Ranga untuk mengembangkan sistem pencatatan yang sistematis dan teratur. Ini akan membantu memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar dan laporan keuangan dapat disusun dengan akurat. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada pengelola BUMDes Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang menyatakan Bahwa:

Kami menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Kami telah mulai menyusun rencana untuk membuat sistem pencatatan keuangan yang sederhana dan jelas. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat dengan memperbaiki pengelolaan dana

Pengelola BUMDes Desa Ranga menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Mereka telah memulai langkah-langkah untuk menyusun sistem pencatatan keuangan yang sederhana dan jelas. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan keuangan akan menjadi lebih transparan.

Sistem pencatatan yang direncanakan akan membantu dalam memonitor dan melaporkan keuangan dengan lebih baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Pengelola berharap bahwa dengan sistem ini, masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana dana dikelola dan digunakan. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dana dan memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat. Dengan pencatatan yang baik, pengelolaan dana BUMDes akan lebih teratur dan efisien.

Secara keseluruhan, upaya ini bertujuan untuk menciptakan transparansi yang lebih besar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Penerapan sistem pencatatan keuangan yang baik diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada pengelola BUMDes Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang menyatakan Bahwa:

Pengelolaan keuangan yang lebih baik diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian desa dengan

menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Meskipun saat ini belum ada pencatatan yang baik, kami yakin bahwa perbaikan dalam sistem keuangan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi desa.

Pengelolaan keuangan yang lebih baik di BUMDes Desa Ranga diharapkan bisa memperbaiki perekonomian desa. Dengan sistem keuangan yang lebih teratur, diharapkan akan ada lebih banyak lapangan kerja baru bagi warga desa. Saat ini, pencatatan keuangan di BUMDes Desa Ranga masih kurang baik. Namun, jika kami bisa memperbaiki sistem pencatatan, kami percaya hal ini akan membantu mengelola keuangan dengan lebih efektif.

Perbaikan dalam sistem keuangan akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya pencatatan yang baik, penggunaan dana akan lebih jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya, peningkatan sistem keuangan ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi desa. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan pendapatan masyarakat juga akan meningkat.

B. Pembahasan

1. Sistem Pengelolaan Keuangan Bumdes Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

a. Transparansi Laporan Keuangan BUMDes Desa Ranga: Tantangan dan Solusi

Pengelolaan keuangan BUMDes Desa Ranga menghadapi tantangan besar karena ketidakteraturan dalam pencatatan

keuangan. Ketidakhadiran sistem pencatatan yang terstruktur menyebabkan setiap transaksi keuangan tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini berdampak langsung pada ketidakmampuan BUMDes dalam memantau arus kas, menghasilkan laporan keuangan yang akurat, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana. Tanpa dokumentasi yang sistematis, menjadi sangat sulit untuk melakukan analisis keuangan yang akurat, yang diperlukan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Kesulitan ini menimbulkan hambatan serius dalam manajemen keuangan yang dapat mengancam keberlanjutan usaha BUMDes tersebut.

Selain itu, kurangnya pencatatan keuangan yang baik berdampak pada akuntabilitas dan pengendalian internal BUMDes. Tanpa catatan yang memadai, terdapat risiko tinggi terhadap terjadinya kecurangan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Situasi ini juga membuat pengurus BUMDes tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai posisi keuangan mereka, yang pada gilirannya menghambat proses pengambilan keputusan strategis. Ketidakakuratan dalam laporan keuangan juga memperumit proses audit, baik internal maupun eksternal, karena hasil audit mungkin tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Hasil wawancara dengan pengelola BUMDes Desa Ranga mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang ada saat ini tidak memberikan informasi yang jelas dan lengkap. Hal ini disebabkan oleh pencatatan keuangan yang tidak dilakukan dengan baik. Ketidakmampuan laporan keuangan ini dalam memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan BUMDes menghambat proses pengambilan keputusan dan perencanaan keuangan yang efektif. Tanpa data yang akurat, pengurus tidak dapat mengevaluasi kinerja keuangan dengan baik atau membuat rencana yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas keuangan organisasi.

Masalah mendasar lainnya adalah kurangnya pemahaman akuntansi di antara pengelola keuangan BUMDes. Ketidakmampuan dalam melakukan pencatatan keuangan secara sistematis menunjukkan kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi. Hal ini berdampak negatif pada penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Ketidakmampuan ini juga mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BUMDes, yang merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan usaha.

Untuk mengatasi tantangan ini, langkah pertama yang perlu diambil adalah mengimplementasikan sistem pencatatan

keuangan yang lebih baik dan terstruktur, yang bisa didukung oleh digitalisasi melalui perangkat lunak akuntansi. Selain itu, penting bagi BUMDes untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi para pengelola agar mereka dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang baik. Dengan meningkatkan kapasitas pengelola dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan, BUMDes Desa Ranga akan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya akan mendukung keberlanjutan dan kesuksesan BUMDes tersebut.

b. Keterbandingan (*Comparability*): Laporan keuangan BUMDes

Pengelolaan laporan keuangan yang baik merupakan kunci bagi BUMDes untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Saat ini, BUMDes Desa Ranga Kecamatan Enrekang menghadapi tantangan besar dalam menyusun laporan keuangan yang jelas dan terstruktur. Salah satu masalah utama yang terungkap dari wawancara dengan pengelola BUMDes adalah kurangnya pencatatan keuangan yang memadai. Pencatatan yang tidak teratur menyebabkan laporan keuangan menjadi sulit dipahami, sehingga menyulitkan pengelola dalam melacak transaksi dan memantau arus kas. Akibatnya, keputusan yang diambil berdasarkan laporan keuangan yang tidak

akurat dapat berdampak negatif pada pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan desa.

Kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan di kalangan pengelola BUMDes Desa Ranga juga menjadi masalah serius. Beberapa pengelola mungkin tidak memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang keuangan atau akuntansi, sehingga mereka kesulitan memahami pentingnya pencatatan yang akurat dan konsisten. Tanpa pengetahuan yang memadai, standar pencatatan keuangan di BUMDes menjadi rendah, yang dapat mengarah pada kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini semakin diperparah oleh laporan keuangan yang rumit atau tidak jelas, yang membuat pengelola yang memiliki literasi keuangan rendah semakin kesulitan dalam memahami dan menggunakan laporan tersebut untuk perencanaan dan pengelolaan kegiatan BUMDes secara efektif.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang signifikan, termasuk pengembangan sistem pencatatan keuangan yang lebih terstruktur dan mudah diikuti. Sistem ini harus dirancang agar mampu merekam semua transaksi keuangan secara detail dan memudahkan pengelola dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan informatif. Selain itu, pelatihan keuangan bagi para pengelola sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mereka

tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi dan manajemen keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih mudah dipahami, dan pengelola dapat menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat waktu.

Adanya sistem pencatatan keuangan yang baik akan memungkinkan BUMDes Desa Ranga untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka. Dengan laporan keuangan yang lebih jelas dan terstruktur, pengelola dapat dengan mudah membandingkan laporan keuangan dari tahun ke tahun, mengidentifikasi tren atau pola dalam pengeluaran dan pendapatan, serta membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas. Ini juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Pada akhirnya, upaya perbaikan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pengelolaan keuangan BUMDes dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

c. Konsistensi: Laporan keuangan BUMDes

Kondisi pencatatan keuangan di BUMDes Desa Ranga saat ini masih belum optimal, menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang akurat dan tidak mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai perubahan keuangan dari waktu ke waktu.

Hasil wawancara dengan pengelola BUMDes mengungkapkan bahwa mereka belum menerapkan metode akuntansi yang terstruktur dan konsisten, yang berakibat pada kurangnya akurasi dan transparansi dalam laporan keuangan. Ketidakadaan sistem pencatatan yang baik ini menghambat kemampuan BUMDes untuk membuat keputusan yang tepat, karena data keuangan yang tersedia tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Selain itu, belum adanya pemahaman yang memadai mengenai pentingnya penerapan standar akuntansi yang jelas menyebabkan pengelola BUMDes Desa Ranga cenderung mengabaikan prosedur akuntansi yang baku. Hal ini berdampak negatif pada penyusunan laporan keuangan yang tidak hanya kurang akurat, tetapi juga sulit dipertanggungjawabkan. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mengurangi kredibilitas BUMDes di mata para pemangku kepentingan, serta menghambat upaya untuk mencapai keberlanjutan finansial. Kesalahan dalam pencatatan transaksi, pengawasan anggaran, dan penyusunan laporan keuangan menjadi masalah utama yang harus segera diatasi.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang serius untuk membangun sistem pencatatan keuangan yang lebih terstruktur dan sistematis. Pengelola BUMDes perlu diberikan

pelatihan dan bimbingan mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang akurat dan rutin, serta penerapan metode akuntansi yang terstandar. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi keuangan atau perangkat lunak akuntansi sederhana, dapat menjadi solusi efektif untuk memfasilitasi pencatatan yang lebih efisien. Dengan sistem pencatatan yang baik, laporan keuangan BUMDes dapat menjadi alat yang lebih informatif untuk menganalisis kinerja keuangan secara berkala dan mengidentifikasi tren serta perubahan keuangan dari waktu ke waktu.

Penting juga untuk mempertimbangkan pendampingan rutin dari tenaga ahli akuntansi untuk memastikan penerapan metode akuntansi yang konsisten dan efektif. Implementasi sistem akuntansi yang terstandar dan adopsi perangkat lunak akuntansi yang sesuai akan membantu meningkatkan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas laporan keuangan di BUMDes Desa Ranga. Dengan demikian, BUMDes dapat lebih efektif dalam menjalankan perencanaan keuangan jangka panjang, pengambilan keputusan strategis, serta upaya untuk mencapai keberlanjutan dan perkembangan yang lebih baik.

d. Materialitas: Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

Pengelolaan keuangan di BUMDes Desa Ranga menghadapi tantangan besar akibat tidak adanya pencatatan yang sistematis dan konsisten. Hal ini menjadi kendala utama dalam memantau arus kas, mengelola pengeluaran, dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Dalam laporan keuangan yang baik, materialitas informasi sangat penting, karena setiap transaksi dan kejadian keuangan harus dicatat dan dilaporkan dengan jelas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, ketidakhadiran sistem pencatatan yang memadai di BUMDes Desa Ranga menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak terstruktur, sulit dianalisis, dan menimbulkan ketidakjelasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil wawancara dengan pengelola BUMDes Desa Ranga menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan dalam laporan keuangan merupakan masalah serius yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Pengelola mengakui bahwa tanpa pencatatan yang sistematis, sulit bagi mereka untuk melacak transaksi keuangan dan menyusun laporan yang akurat. Ketidakhadiran data yang terstruktur ini mengakibatkan laporan keuangan yang tidak konsisten dan sulit untuk diaudit, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan BUMDes dalam membuat keputusan

keuangan yang tepat serta merencanakan pengembangan usaha secara efektif.

Ketidakakuratan laporan keuangan tidak hanya menghambat evaluasi kinerja keuangan, tetapi juga berdampak pada efisiensi pengelolaan anggaran. Dengan laporan keuangan yang tidak konsisten dan tidak terstruktur, sulit bagi pengelola BUMDes untuk melakukan analisis yang mendalam tentang kondisi keuangan organisasi. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang kurang tepat dalam pengelolaan sumber daya, yang pada akhirnya mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap BUMDes. Oleh karena itu, upaya perbaikan dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan BUMDes di Desa Ranga.

Untuk mengatasi masalah ini, BUMDes Desa Ranga perlu segera mengimplementasikan sistem pencatatan keuangan yang terstruktur dan terstandar. Langkah ini meliputi penerapan metode akuntansi yang sesuai, pelatihan staf dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, serta penggunaan perangkat lunak akuntansi yang dapat mengotomasi proses tersebut. Selain itu, BUMDes harus menerapkan kebijakan pengendalian internal yang ketat untuk memastikan konsistensi dan keakuratan dalam pencatatan keuangan. Dengan memperbaiki sistem pencatatan

dan laporan keuangan, BUMDes Desa Ranga akan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan dari komunitas dan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya mendukung pengelolaan dan pengembangan usaha yang lebih baik dan berkelanjutan.

e. Akuntabilitas Dan Tanggung Jawab: Laporan Keuangan Bumdes

Akuntabilitas dan tanggung jawab dalam laporan keuangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan elemen krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Laporan keuangan yang baik harus mencakup laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional BUMDes. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban manajemen untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, sementara tanggung jawab mencakup pemenuhan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Hal ini penting agar masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya dapat melihat dengan jelas bagaimana keputusan keuangan mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan desa.

Saat ini, BUMDes Desa Ranga menghadapi masalah serius terkait pencatatan keuangan. Tanpa sistem pencatatan yang memadai, laporan keuangan yang dihasilkan mungkin tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Ketiadaan metode sistematis untuk mencatat transaksi keuangan mengakibatkan sulitnya memantau arus kas dan penggunaan dana secara akurat. Pencatatan yang kurang teratur berpotensi menyebabkan kesalahan atau ketidaklengkapan data, yang pada akhirnya berdampak negatif pada transparansi dan akurasi laporan keuangan.

Untuk mengatasi masalah ini, BUMDes perlu memulai pencatatan semua transaksi keuangan dengan detail dan sistematis. Hal ini mencakup pencatatan pemasukan, pengeluaran, dan berbagai transaksi lainnya secara teratur. Implementasi sistem pencatatan yang lebih baik, seperti menggunakan software akuntansi atau metode manual yang lebih terstruktur, serta pelatihan bagi pengelola keuangan, dapat membantu memastikan bahwa laporan keuangan lebih akurat dan transparan. Dengan sistem pencatatan yang efektif, BUMDes akan lebih mampu memantau arus kas, mendeteksi masalah lebih awal, dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang tersedia.

Secara keseluruhan, perbaikan dalam pencatatan keuangan akan sangat berkontribusi pada pengelolaan keuangan BUMDes yang lebih baik. Laporan keuangan yang terstruktur dengan baik akan meningkatkan transparansi dan akurasi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan sistem pencatatan yang lebih efektif, BUMDes akan dapat merencanakan dan mengelola anggaran dengan lebih efisien, sehingga meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya dan kinerja keseluruhan BUMDes.

f. Asas Ekonomi Entitas: Laporan Keuangan Bumdes

Laporan keuangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) memainkan peran krusial dalam menilai kinerja finansial dan kesehatan entitas. Dokumen ini meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, masing-masing memberikan pandangan yang berbeda namun saling melengkapi tentang kondisi keuangan BUMDes. Neraca menyajikan posisi keuangan pada suatu titik waktu tertentu, mencerminkan aset, kewajiban, dan ekuitas entitas. Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan biaya selama periode tertentu, yang membantu dalam menghitung laba atau rugi bersih. Sementara itu, laporan arus kas menunjukkan aliran kas masuk dan keluar, memberikan indikasi tentang likuiditas dan kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

Namun, pada saat ini, BUMDes Desa Ranga belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang teratur. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam melacak dan memverifikasi transaksi keuangan, yang berdampak pada ketidakakuratan laporan keuangan. Tanpa pencatatan yang konsisten, laporan yang dihasilkan tidak dapat dipastikan akurat, menghambat evaluasi kesehatan finansial secara efektif. Ini juga mengurangi kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan menurunkan transparansi serta akuntabilitas kepada masyarakat desa.

Pelaporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting) merupakan komponen penting dalam laporan keuangan BUMDes, bertujuan untuk mengungkapkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari aktivitas operasional. Pelaporan ini meliputi kinerja dalam pengelolaan sumber daya alam, partisipasi dalam kegiatan sosial, serta kontribusi ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui pelaporan berkelanjutan, BUMDes dapat menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, meningkatkan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan.

Saat ini, ketidakadaan sistem pencatatan yang memadai di BUMDes Desa Ranga mengakibatkan laporan keuangan kami

belum bisa menggambarkan komitmen terhadap keberlanjutan secara optimal. Kami menyadari pentingnya memperbaiki sistem pencatatan keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, kami berencana untuk segera mengimplementasikan sistem pencatatan yang terstruktur. Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan manajemen keuangan dan memungkinkan kami untuk menyajikan laporan yang lebih akurat dan menunjukkan komitmen kami terhadap keberlanjutan di masa depan..

2. Tantangan dan Kendala dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes Desa Ranga

a. Rendahnya Tingkat Literasi Keuangan Pengelola Keuangan

Rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan pengelola keuangan, khususnya dalam organisasi seperti BUMDes, merupakan tantangan besar yang dapat menghambat pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan. Pengetahuan yang terbatas tentang prinsip dasar keuangan, seperti perencanaan anggaran, analisis laporan keuangan, dan pengelolaan arus kas, sering kali mengakibatkan keputusan yang kurang tepat dalam alokasi sumber daya. Hal ini bisa menyebabkan inefisiensi, ketidakstabilan finansial, serta kurangnya akuntabilitas, yang pada gilirannya berdampak negatif pada kinerja organisasi dan kepercayaan masyarakat.

Temuan dari wawancara dengan pengelola BUMDes Desa Ranga menunjukkan bahwa masalah umum dalam pengelolaan keuangan termasuk ketidakmampuan dalam pencatatan transaksi yang benar, kesalahan dalam perhitungan biaya, dan ketidakakuratan laporan keuangan. Kesalahan ini dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak terkontrol dan menyulitkan evaluasi kinerja keuangan. Ketidakakuratan dalam pencatatan dan perhitungan mengganggu kontrol pengeluaran dan pelacakan aliran kas, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan keuangan strategis yang tepat.

Selain itu, kurangnya pemahaman keuangan memperburuk situasi dengan tidak adanya laporan keuangan yang akurat. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mengendalikan pengeluaran dan tidak adanya data yang memadai untuk analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Dengan demikian, perlu ada pelatihan dan penguatan sistem pencatatan serta pelaporan keuangan agar masalah ini dapat diatasi, sehingga manajemen keuangan dapat dilakukan dengan lebih baik.

Untuk mengatasi kekurangan pemahaman keuangan ini, BUMDes Desa Ranga telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis, seperti pelatihan dan pembelajaran untuk staf. Selain itu, mereka juga menggandeng pihak luar seperti konsultan keuangan dan instansi pemerintah untuk memberikan bimbingan

tambahan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan staf dalam konsep-konsep keuangan dasar, pengelolaan anggaran, dan penyusunan laporan keuangan yang akurat, serta memperbaiki sistem pencatatan keuangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

b. Ketergantungan Pada Sumber Daya Manusia Terbatas

Ketergantungan pada sumber daya manusia yang terbatas merupakan tantangan signifikan dalam pengelolaan keuangan di BUMDes Desa Ranga. Situasi ini timbul ketika organisasi sangat bergantung pada jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia. Keterbatasan staf, terutama dalam hal pemahaman dan keterampilan di bidang keuangan, dapat menghambat produktivitas dan efisiensi operasional. Hal ini terutama dirasakan ketika hanya ada dua orang staf yang menangani seluruh aspek pengelolaan keuangan, dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan. Beban kerja yang berat dan kurangnya keterampilan menyebabkan proses keuangan menjadi rumit dan rentan terhadap kesalahan.

Masalah utama yang dihadapi staf BUMDes Desa Ranga mencakup keterbatasan pemahaman dalam laporan keuangan dan pencatatan transaksi yang tidak akurat. Kurangnya

pemahaman ini sering disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang tidak memadai dalam akuntansi serta kurangnya pelatihan khusus. Ditambah dengan ketidaktersediaan alat bantu seperti software akuntansi, tantangan ini semakin kompleks. Proses pengelolaan keuangan yang tidak efisien dan kurangnya transparansi menjadi konsekuensi dari masalah ini, mengarah pada risiko ketidakakuratan dalam pelaporan finansial.

Kedepan, penting untuk melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas staf dalam aspek dasar akuntansi dan pengelolaan keuangan. Pelatihan ini harus mencakup penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Selain itu, evaluasi dan pengembangan sistem pencatatan yang lebih baik serta implementasi teknologi informasi, seperti perangkat lunak akuntansi, dapat membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban kerja dan meningkatkan keterampilan staf.

Selain itu, penambahan personel dengan keahlian khusus dalam bidang keuangan juga dapat membantu. Staf tambahan ini akan mendukung pengelolaan keuangan dan memperkuat sistem yang ada, mengurangi kesalahan dan meningkatkan transparansi. Dengan adanya langkah-langkah strategis ini, BUMDes Desa Ranga dapat mengatasi tantangan dalam pengelolaan keuangan,

meningkatkan pemahaman staf, serta memastikan akuntabilitas yang lebih baik dalam pelaporan keuangan mereka.

c. Kurangnya Sistem Pencatatan Keuangan yang Terstruktur

Kurangnya sistem pencatatan keuangan yang terstruktur pada BUMDes Desa Ranga mengacu pada ketidakmampuan dalam mengatur dan mendokumentasikan transaksi keuangan secara sistematis dan teratur. Ketidakteraturan ini sering menyebabkan kesulitan dalam melacak aliran kas, mengidentifikasi kesalahan, dan menyusun laporan keuangan yang akurat. Akibatnya, transparansi keuangan dapat terganggu dan akuntabilitas menurun, yang menyulitkan manajer dan pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan data keuangan. Ketiadaan struktur dalam pencatatan keuangan memengaruhi kemampuan BUMDes untuk memantau dan mengevaluasi kesehatan finansialnya, serta dapat menambah risiko kesalahan atau penyelewengan yang berdampak negatif pada kinerja dan keberlanjutan finansial organisasi.

Dalam wawancara dengan pengelola BUMDes Desa Ranga, terungkap bahwa salah satu tantangan utama adalah pengaturan keuangan yang kurang efektif akibat tidak adanya sistem pencatatan yang jelas. Para pegawai mengalami kesulitan dalam memonitor dan mengevaluasi aliran dana masuk dan keluar karena kurangnya struktur dan penggunaan teknologi modern.

Laporan keuangan yang dihasilkan sering tidak akurat, dan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis sulit didapatkan. Ketidakteraturan ini menyebabkan pengelolaan keuangan yang kurang efisien, yang pada akhirnya memengaruhi kesehatan keuangan BUMDes secara keseluruhan.

Keterbatasan ini semakin diperparah oleh kurangnya pelatihan dan pemahaman pegawai tentang pentingnya sistem pencatatan yang akurat. Para pegawai BUMDes Desa Ranga sering membuat kesalahan dalam pengelolaan dana karena tidak adanya panduan yang jelas. Kesalahan ini berisiko menimbulkan inefisiensi dalam alokasi dana dan berpotensi mengakibatkan kerugian finansial bagi organisasi. Tanpa adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, situasi semakin sulit diatasi, padahal SOP sangat penting untuk memastikan konsistensi dan akurasi dalam pencatatan keuangan.

Solusi untuk mengatasi masalah ini meliputi pengembangan dan implementasi sistem pencatatan keuangan yang lebih baik serta pelatihan intensif bagi pegawai BUMDes Desa Ranga. Dengan adanya sistem pencatatan yang terstruktur, pegawai akan lebih mudah melacak setiap transaksi dan memastikan data keuangan dicatat dengan benar. Selain itu, pelatihan berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengelola dan melaporkan keuangan. Dengan langkah-

langkah ini, BUMDes Desa Ranga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, mengurangi kesalahan dalam pengelolaan dana, dan memperkuat posisi keuangan mereka secara keseluruhan.

d. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Staf

Tantangan yang dihadapi oleh BUMDes Desa Ranga terkait dengan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan akuntansi staf menunjukkan dampak signifikan terhadap kinerja dan efisiensi organisasi. Ketidakmampuan staf dalam mengelola laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu mencerminkan kurangnya pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi dasar. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan proses pembukuan, yang pada gilirannya dapat merugikan kualitas laporan keuangan. Ketidaktepatan laporan keuangan ini tidak hanya mengganggu operasional internal BUMDes tetapi juga menghambat pengambilan keputusan dan transparansi informasi keuangan kepada pemangku kepentingan.

Proses penyusunan laporan keuangan yang sering mengalami keterlambatan merupakan salah satu dampak dari kurangnya keterampilan akuntansi staf. Staf yang tidak terlatih harus menghabiskan waktu ekstra untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan dalam pencatatan transaksi. Proses

pengumpulan dan pencatatan data yang lambat dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan jadwal pelaporan yang telah ditetapkan, mengganggu alur operasional, dan berpotensi menunda pengambilan keputusan penting. Keterlambatan ini memperburuk efisiensi kerja dan mengurangi daya saing organisasi dalam menghadapi perubahan dan tantangan pasar.

Akurasi laporan keuangan juga menjadi masalah serius akibat kekurangan pengetahuan akuntansi. Kesalahan dalam pengklasifikasian dan pencatatan transaksi menyebabkan informasi keuangan yang disajikan menjadi tidak akurat. Laporan keuangan yang salah dapat memberikan gambaran yang keliru tentang kondisi keuangan BUMDes, yang dapat mempengaruhi keputusan strategis yang diambil oleh manajemen. Misinformasi ini dapat berdampak pada perencanaan keuangan, alokasi sumber daya, dan strategi pengembangan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan BUMDes Desa Ranga.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya serius dalam meningkatkan keterampilan akuntansi staf melalui pelatihan intensif dan pendidikan berkelanjutan. Program pelatihan yang terstruktur dapat membantu staf memahami prinsip-prinsip akuntansi dasar dan praktik terbaik dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, penerapan sistem akuntansi yang lebih baik

dan dukungan sumber daya yang memadai juga diperlukan untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan dan meningkatkan transparansi. Solusi jangka panjang ini akan mendukung peningkatan kinerja dan efisiensi BUMDes Desa Ranga, memastikan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan organisasi.

e. Keterbatasan Sumber Daya Teknologi

Keterbatasan sumber daya teknologi di BUMDes Desa Ranga merupakan hambatan utama dalam meningkatkan efektivitas operasional dan pengelolaan organisasi. Terbatasnya akses terhadap perangkat keras yang memadai dan perangkat lunak yang mutakhir mempengaruhi kemampuan BUMDes dalam melakukan pencatatan keuangan secara akurat dan transparan. Metode manual yang masih digunakan dalam pencatatan keuangan tidak hanya memperlambat proses, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan administrasi. Hal ini mengakibatkan ketidakakuratan dalam laporan keuangan dan keterlambatan dalam penyampaian informasi yang penting, yang pada akhirnya menghambat kemampuan BUMDes untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat.

Hasil wawancara dengan pengelola BUMDes Desa Ranga mengungkapkan bahwa ketergantungan pada metode manual menjadi salah satu penyebab utama masalah ini. Proses

pencatatan yang masih dilakukan secara manual memakan waktu dan sering kali menghasilkan data yang tidak akurat. Kurangnya pemahaman tentang teknologi laporan keuangan juga berkontribusi pada ketidakakuratan ini. Banyak pegawai yang belum familiar dengan aplikasi atau perangkat lunak yang bisa membantu mengotomatiskan proses pencatatan, sehingga mereka terjebak dalam cara-cara lama yang kurang efisien.

Selain masalah pemahaman teknologi, akses terbatas ke pelatihan dan sumber daya teknologi juga memperburuk situasi. Kurangnya investasi dalam infrastruktur teknologi, seperti perangkat keras yang memadai dan koneksi internet yang stabil, menjadi hambatan signifikan. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, pegawai kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pencatatan yang lebih efisien. Semua data harus dikumpulkan dan diverifikasi secara manual, yang memperlambat proses penyelesaian laporan keuangan dan menambah beban kerja pegawai.

Terakhir, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya teknologi dalam manajemen keuangan menjadi masalah tambahan. Banyak pegawai yang merasa nyaman dengan metode manual dan enggan untuk beralih ke sistem yang lebih canggih. Ketidapahaman tentang keuntungan jangka panjang dari penggunaan teknologi menyebabkan mereka tetap menggunakan

metode yang sudah ada, meskipun tidak efisien. Tanpa adanya dorongan dan pelatihan yang memadai, pegawai cenderung mempertahankan praktik lama yang pada akhirnya berdampak negatif pada akurasi dan ketepatan waktu laporan keuangan, serta pada pengembangan dan pertumbuhan BUMDes Desa Ranga.

f. Kurangnya Pengawasan dan Kontrol Internal:

Pengawasan dan kontrol internal merupakan aspek vital dalam manajemen BUMDes, khususnya di Desa Ranga. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan tata kelola yang baik dan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta operasional. Pengawasan internal mencakup berbagai kegiatan seperti audit internal dan pemantauan berkala terhadap laporan keuangan. Ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi dalam proses administratif dan keuangan. Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan BUMDes dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana, sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Kontrol internal berfungsi untuk menjaga integritas transaksi dengan penerapan prosedur dan kebijakan yang ketat. Hal ini melibatkan pembatasan akses, verifikasi ganda, serta pelatihan

bagi staf mengenai praktik keuangan yang benar. Kontrol ini tidak hanya berfokus pada pencegahan kesalahan tetapi juga pada pembentukan budaya akuntabilitas di seluruh organisasi. Dengan prosedur dan kebijakan yang jelas, BUMDes dapat mengurangi risiko penyimpangan dan memastikan bahwa semua transaksi keuangan tercatat dengan akurat, mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Hasil wawancara dengan pengelola BUMDes Desa Ranga mengungkapkan adanya kekurangan signifikan dalam pemahaman teknologi laporan keuangan. Banyak pegawai mengalami kesulitan dalam menggunakan perangkat lunak akuntansi atau sistem berbasis teknologi untuk menyusun laporan keuangan. Ketidakmampuan ini berdampak pada akurasi dan efisiensi pelaporan, seringkali menghasilkan laporan yang tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Selain itu, ketidakmampuan dalam memanfaatkan teknologi secara optimal mengakibatkan kurangnya transparansi dalam proses pelaporan keuangan, yang dapat menghambat proses audit dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pelatihan yang intensif mengenai penggunaan teknologi laporan keuangan dan pembaruan sistem yang digunakan. Penambahan aturan

pengawasan yang ketat serta pengecekan rutin terhadap laporan keuangan juga sangat penting. Evaluasi kinerja secara berkala akan membantu dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan sejak dini, serta memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai rencana. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan akurasi laporan keuangan tetapi juga membangun kepercayaan dan kredibilitas BUMDes di mata masyarakat dan pemangku kepentingan.

3. Pengelolaan Keuangan Bumdes Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

a. Pengelolaan keuangan belum maksimal

Pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang memegang peranan penting dalam memperkuat perekonomian lokal. Sebagai lembaga usaha milik desa, BUMDes memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang baik. Namun, saat ini pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Ranga belum optimal karena belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang terstruktur. Tanpa sistem yang memadai, manfaat dari BUMDes sulit diwujudkan sepenuhnya, dan perekonomian desa tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya.

Implementasi sistem akuntansi yang terstruktur dan konsisten adalah langkah krusial untuk memperbaiki pengelolaan keuangan BUMDes. Penggunaan perangkat lunak akuntansi yang tepat atau sistem pencatatan manual yang sistematis dapat membantu pencatatan transaksi keuangan dengan lebih akurat dan transparan. Dengan adanya laporan keuangan yang jelas dan teratur, pengelola BUMDes dapat lebih mudah memantau arus kas, mengelola anggaran, dan membuat keputusan strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mitra usaha terhadap BUMDes, yang penting untuk keberhasilan program-program yang dijalankan.

Namun, masalah utama yang dihadapi saat ini adalah kurangnya sistem pencatatan yang terstruktur, yang menyebabkan kesulitan dalam melaporkan keuangan secara akurat. Kesulitan ini berpotensi menurunkan akurasi laporan keuangan dan menghambat evaluasi kinerja keuangan. Tanpa sistem yang jelas, pencatatan transaksi menjadi tidak konsisten dan rentan terhadap kesalahan, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan pemangku kepentingan seperti masyarakat desa dan pihak-pihak yang terlibat dalam pendanaan atau kerjasama dengan BUMDes.

Untuk mengatasi masalah ini, BUMDes Desa Ranga perlu segera mengembangkan dan menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang terstruktur. Langkah-langkah awal yang perlu diambil termasuk pembuatan prosedur pencatatan standar dan penggunaan perangkat lunak akuntansi yang sesuai. Selain itu, pelatihan staf dalam pencatatan dan pelaporan keuangan serta evaluasi berkala terhadap sistem yang diterapkan sangat penting untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap prosedur. Dengan sistem yang baik, BUMDes dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan Desa Ranga.

b. Tantangan Pengelolaan Keuangan Bumdes Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan BUMDes adalah kurangnya kejelasan dalam pencatatan transaksi dan kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Tanpa adanya sistem pencatatan yang baik, laporan keuangan sering kali menjadi tidak konsisten dan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam laporan keuangan dan menurunkan transparansi serta akuntabilitas. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi BUMDes, khususnya di Desa Ranga, untuk mengembangkan sistem pencatatan yang sistematis dan teratur agar semua transaksi dapat dicatat dengan benar dan laporan keuangan dapat disusun dengan akurat.

Pengelola BUMDes Desa Ranga menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Mereka telah memulai langkah-langkah untuk menyusun sistem pencatatan keuangan yang sederhana dan jelas. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan keuangan akan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Penerapan sistem pencatatan yang baik diharapkan dapat membantu dalam memonitor dan melaporkan keuangan dengan lebih baik. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana, sehingga masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana dana dikelola dan digunakan.

Dalam wawancara yang dilakukan, pengelola BUMDes Desa Ranga juga mengungkapkan harapan bahwa sistem pencatatan keuangan yang lebih baik akan berkontribusi pada perbaikan perekonomian desa. Dengan pencatatan yang lebih teratur, diharapkan akan ada penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat. Meskipun saat ini pencatatan keuangan masih kurang baik, pengelola yakin bahwa perbaikan dalam sistem keuangan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi desa. Perbaikan ini diharapkan dapat mengelola dana dengan lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, upaya dalam memperbaiki sistem pencatatan keuangan di BUMDes Desa Ranga bertujuan untuk menciptakan transparansi yang lebih besar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan. Dengan sistem pencatatan yang baik, penggunaan dana akan menjadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan sistem keuangan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian desa, dengan efek jangka panjang berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana yang lebih teratur dan efisien.

Untuk mengatasi masalah ini, pengembangan sistem pencatatan yang sistematis dan teratur merupakan langkah awal yang penting. Penggunaan perangkat lunak akuntansi atau metode pencatatan manual yang tepat dapat membantu memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar dan laporan keuangan disusun dengan akurat. Implementasi sistem yang baik dapat mempermudah pemantauan arus kas dan pengelolaan anggaran, yang sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang menekankan pentingnya akurasi dan konsistensi dalam pencatatan transaksi (Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, 2019).

(Darmawan & Nurul Safitri, 2024) kompetensi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja BUMDES Mekar Jaya Di Desa

Citta Kab. Soppeng. Oleh karena itu, pengetahuan, keterampilan, sikap merupakan factor - faktor yang mempengaruhi kinerja BUMDES, sehingga memberikan manfaat terhadap BUMDES Mekar Jaya Di Desa Citta Kab. Soppeng. Akan tetapi diantara 3 indikator kompetensi terdapat indicator yang paling dominan yaitu keterampilan.

Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan BUMDes adalah langkah penting untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas komunitas. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi potensi penyalahgunaan dana.

Pengelola BUMDes Desa Ranga telah mulai menyusun rencana untuk sistem pencatatan keuangan yang lebih baik. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang diharapkan akan memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat desa.

Secara keseluruhan, perbaikan sistem pencatatan keuangan di BUMDes Desa Ranga diharapkan dapat mendukung peningkatan perekonomian desa dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penerapan sistem akuntansi yang baik tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian desa. Dengan pengelolaan yang lebih baik,

diharapkan bahwa pendapatan masyarakat akan meningkat dan perekonomian desa menjadi lebih berkelanjutan (Brigham, E. F., & Ehrhardt, 2016).

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes didirikan berdasarkan potensi dan kebutuhan ekonomi setempat, sehingga mampu menciptakan peluang ekonomi baru, lapangan kerja, serta memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Di Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, peran BUMDes sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi desa. Namun, seperti yang terungkap dari hasil wawancara, pengelolaan keuangan yang belum optimal menjadi hambatan utama dalam memaksimalkan potensi BUMDes tersebut.

Sistem pengelolaan keuangan yang tidak terstruktur dan kurangnya akurasi dalam pencatatan transaksi menyebabkan BUMDes mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan mitra kerja terhadap kinerja BUMDes, serta menghambat kemampuan BUMDes untuk mengevaluasi keuangan secara efektif. Akibatnya, potensi BUMDes dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tidak dapat terealisasi secara maksimal.

Padahal, BUMDes memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan cara memfasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal. Melalui berbagai unit usaha yang dikelola oleh BUMDes, seperti pertanian, perdagangan, atau jasa, BUMDes dapat menciptakan peluang bisnis baru yang sesuai dengan karakteristik desa dan kebutuhan masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi ini dapat dialokasikan kembali untuk pengembangan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, atau program-program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga desa.

Untuk itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan BUMDes Desa Ranga dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan. Implementasi sistem pencatatan yang baik akan memudahkan pengelola dalam memantau arus kas, mengelola anggaran, serta membuat keputusan ekonomi yang lebih tepat berdasarkan data yang akurat. Dengan sistem ini, BUMDes akan mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga ekonomi yang mendorong pemerataan kesejahteraan dan memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Lebih dari itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan BUMDes juga sangat penting. Dengan partisipasi aktif warga dalam perencanaan dan evaluasi penggunaan dana,

pengelolaan dana BUMDes dapat berjalan lebih transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Transparansi ini akan mendorong akuntabilitas, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Dampaknya, BUMDes tidak hanya akan berfungsi sebagai alat pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, di mana seluruh warga dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi desa.

Dengan manajemen yang lebih baik, BUMDes Desa Ranga memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan desa secara signifikan, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada sumber daya eksternal. Peningkatan ini akan memberikan dampak jangka panjang yang dapat mengubah struktur ekonomi desa menjadi lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing. BUMDes yang dikelola dengan baik akan menjadi kunci sukses dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berpihak pada kepentingan masyarakat desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Bayu Aprillianto, Bunga Maharani, Yosefa Sayekti, Ririn Irmadariyani, Indah Purnamawati, Agung Budi Sulistiyo (2022). Menyatakan tiap BUMDes memiliki lebih dari 1 unit usaha, sehingga

digitalisas laporan keuangan dilengkapi dengan konsolidasi antar unit usaha.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan dari penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat di ambil terkait Analisis sistem pengelolaan keuangan BUMDes Di Desa Ranga Kecamatan Enrekang, yakni :

1. Pengelolaan keuangan BUMDes Desa Ranga mengalami kesulitan akibat tidak adanya sistem pencatatan yang terstruktur. Hal ini menghambat pemantauan arus kas dan akurasi laporan keuangan. Akuntabilitas dan pengendalian internal juga terganggu. Digitalisasi dan pelatihan sistem pencatatan diperlukan untuk memperbaiki situasi ini. Langkah-langkah ini akan meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi pengelolaan keuangan.
2. Tantangan utama meliputi kurangnya sistem pencatatan yang memadai, kapasitas SDM yang terbatas, dan kurangnya transparansi. Sistem pencatatan yang buruk mengarah pada ketidakakuratan laporan keuangan. Kapasitas SDM yang terbatas menyebabkan kesalahan pelaporan. Penerapan sistem pencatatan yang terstruktur dan pelatihan SDM diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan serta transparansi.
3. Pengelolaan keuangan BUMDes Desa Ranga penting untuk pertumbuhan ekonomi desa namun menghadapi masalah pencatatan yang tidak terstruktur. Sistem pencatatan yang baik

diperlukan untuk mengelola anggaran dan transparansi. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan juga krusial untuk memastikan program sesuai kebutuhan. Peningkatan sistem pencatatan dan pelibatan masyarakat dapat mendukung perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yakni:

1. Diharapkan Implementasikan sistem pencatatan keuangan yang terstruktur melalui digitalisasi dan pelatihan bagi pengurus BUMDes. Ini akan mendukung perencanaan, meningkatkan akurasi laporan, dan memperbaiki akuntabilitas
2. Fokus pada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, implementasikan sistem pencatatan dan pelaporan yang terstruktur, serta perkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
3. Diharapkan sistem pencatatan keuangan yang lebih baik dan libatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Ini akan memperbaiki transparansi dan akuntabilitas, serta berpotensi meningkatkan perekonomian desa melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillianto, B., Maharani, B., Sayekti, Y., Irmadariyani, R., Purnamawati, I. I., & Sulistiyo, A. B. (2022). Menuju tata kelola bumdes yang baik melalui digitalisasi dan konsolidasi laporan keuangan. *Jurnal Abdi Panca Marga*, 3(2), 55–60. <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/abdipancamarga/article/view/999>
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2018). Auditing and assurance services: *An Integrated Approach*. Pearson.
- Bachrein, S. (8 C.E.). Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: Strategi dan kebijakan pembangunan perdesaan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 2(133–149). <https://www.neliti.com/id/publications/53751/pendekatan-desa-membangun-di-jawa-barat-strategi-dan-kebijakan-pembangunan-perde>
- Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2016). Financial management: Theory & practice. *Cengage Learning*.
- Caya, M. F. N., & Rahayu, E. (2021). Dampak kesejahteraan masyarakat di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(1), 1–12. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/dampak-bumdes-terhadap-kesejahteraan-masyarakat-di-desa-aik-batu->
- Darmawan, D., & Nurul Safitri. (2024). Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Bumdes Mekar Jaya Di Desa Citta Kab. Soppeng. *DECISION: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 92–97. <https://doi.org/10.31850/decision.v5i1.2945>. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/decision/article/view/2945>
- Darmawan, H. I. W. A. (2022). Jurnal Mirai Management Analisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 241–246. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2014> <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/download/2376/1580>
- Erlina, E., & Sirojuzilam, S. (2020). Efektivitas penerapan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan BUMDES sistem akuntansi BUMDES berbasis web. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 4(1), 282–287. <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/195>
- Febriaty, H. (2018). Pengaruh infrastruktur jalan dan defisit listrik terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 2(2), 71–80. <https://core.ac.uk/download/pdf/326444251.pdf>
- Fkun, E. (2021). Eksistensi badan usaha milik desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Subun Bestobe Kecamatan Insan Barat. *Jurnal Poros Politik*, 1(1), 1–7.

<https://jurnal.unimor.ac.id/JPP/article/view/328>

Hariani, P., Hasibuan, L. S., & Sinambela, E. (2018). Strategi kebijakan BUMDes: Bottom-up of economic development model (Studi kasus Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–59.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Strategi+kebijakan+BUMDes%3A+Bottom-up+of+economic+development+model+%28Studi+kasus+Kecamatan+Beringin+Kabupaten+Deli+Serdang+Provinsi+Sumatera+Utara%29&btnG=

Herdiana, D. (2020). Urgensi revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perihal Pembangunan Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 245–266.

<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss1/14/>

Jayadinata, J. T., & P. (2006). Pembangunan desa dalam pembangunan. *Bandung: ITB*.

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). Intermediate accounting. *Wiley*.

Mulyadi. (2019). Akuntansi pemerintahan. *Salemba Empat*.

Rofidah, N. (2019). *Analisis pengelolaan keuangan badan usaha milik desa (BUMDes) Gondowangi di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15443/>

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). Accounting information systems. *Pearson*.

Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2019). Essentials of corporate finance. *McGraw-Hill Education*.

Sawitri, A. P., Afkar, T., & Suhardiyah, M. (2020). Penguatan pengelolaan keuangan BUMDes sebagai upaya menuju desa mandiri di Desa Kebontunggul Mojokerto. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(2), 470–476. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jpm/article/view/4324>

Schultz, T. W. (2017). Investment in human capital. *NBER Books*.

Sukirno, S. (2006). Ekonomi pembangunan. *Jakarta: Kencana*.

Supriatna, N., & Kusuma, A. M. (2009). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perusahaan. *Aset*, 382.

- Titika, B. M., Huliselan, M., Sanduan, A., Ralahallo, F. N., & Siahainenia, A. J. (2020). Pengelolaan keuangan Bumdes di Kabupaten Kepulauan Aru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 3(1), 197–216. <https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JPMJ/article/download/481/367>
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 257–288. <https://ejournal.uksw.edu/jeb/article/view/2410>
- Wiratna Sujarweni, V., & Laut Mertha Jaya, I. M. (2019). Pengelolaan keuangan Bumdes Sambimulyo di kawasan geoheritage “Tebing Breksi” Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, 1(2), 13–17. https://www.researchgate.net/publication/337740639_Pengelolaan_Keuangan_Bumdes_Sambimulyo_di_Kawasan_Geoheritage_Tebing_Breksi_Yogyakarta
- Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 5(1), 1–4. <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/abdipancamarga/article/view/999>